



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN KE-2

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA
TAHUN 2018-2023**

PEMERINTAH KOTA SERANG

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia serta rahmat-Nya lah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang tahun 2018-2023 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang Tahun 2018-2023 adalah dokumen acuan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang untuk periode 5 (lima) tahun. Dimana termuat didalamnya Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Strategis dan Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Pembangunan selama 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DP3AKB yang berpedoman kepada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Implementasi Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) PD, dan akan dievaluasi pencapaian target yang telah ditetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Untuk itu pencapaian target tersebut perlu dipahami dan disepakati bersama serta diupayakan untuk diwujudkan oleh segenap unsur pimpinan dan staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini banyak pihak yang secara aktif membantu guna terselesaikannya proses penyusunan, dengan ini kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Serang khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Serang, DESEMBER 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA SERANG



ANTHON GUNAWAN, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 LANDASAN HUKUM

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

3.2 TELAAH VISI, MISI DA PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

3.3 TELAAH RENSTRA

3.4 TELAAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai DP3AKB Berdasarkan Jenis Jabatan
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai DP3AKB Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang
Tabel 2.3	Daftar Inventaris
Tabel 2.4	Analisa kekuatan
Tabel 2.5	Analisa Kelemahan
Tabel 2.6	Analisa Peluang
Tabel 2.7	Analisa Ancaman
Tabel 2.8	Analisa Faktor Internal
Tabel 2.9	Analisa Faktor Eksternal
Tabel 2.10	Analisa TOWS
Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2013-2018
Tabel 2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2019-2022
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2017-2022
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan
Tabel 3.2	Fator Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan DP3AKB Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018-2023
Tabel 3.3	Capaian Persentase Anggaran dan Isu Strategis DP3AKB Kota Serang
Tabel 3.4	Alternatif Skenario dan Rekomendasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Tabel 3.5	Aspek Isu Strategis
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Tabel 5.1	Tujuan , Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah (sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 dan/atau Nomor 050-5889)
Tabel 6.3	Rumusan dan Definisi Operasional Indikator Renstra PD
Tabel 6.4	Rumusan Rencana dan Realisasi Indikasi Fokus Kegiatan pada Program Unggulan Tahun 2019-2023
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan (Permendagri 86 Tahun 2018)
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Serang Tahun 2018-2023 (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021)
Tabel 8.1	Definisi Operasional

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.2	Jumlah Pegawai DP3AKB Berdasarkan Jenis Jabatan
Graafik 2.3	Jumlah Pegawai DP3AKB Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Grafik 2.4	Kuadran strategi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur ORGANISASI Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pemerintah Kota Serang mengamanatkan bahwa perencanaan Pembangunan termasuk Renstra Perangkat Daerah, harus disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem Perencanaan Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta adil dan merata. Perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Serang juga harus disusun untuk menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Demikian pula dengan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan nilai-nilai yang dianut oleh Pemerintah Kota Serang.

Aspek yuridis formal dalam pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women / CEDAW*), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga, Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan landasan idiil dan operasional dari pelaksanaan pembangunan nasional, dan Perencanaan pembangunan di tingkat provinsi Banten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang.

Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Pemerintah Kota Serang adalah Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan semangat gotong royong, inovatif dan kreatif ,untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat

mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki dan membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa serta terlindungi.

Pencapaian tujuan Pembangunan pemberdayaan perempuan tersebut, antara lain ditandai dengan terintegrasinya kebijakan pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada semua kebijakan program dan kegiatan pembangunan pada Perangkat Daerah yang responsif gender dan peduli anak serta berperannya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pencapaian tujuan tersebut masih terus diupayakan secara bertahap agar kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terwujud dalam upaya membangun anak menjadi SDM yang berkualitas sebagaimana sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on The Right Of Children* (CRC) yang merupakan salah satu instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Secara umum, pendekatan pemberdayaan perlindungan anak dan Keluarga Berencana dilakukan dengan strategi yaitu: (1) strategi pengarusutamaan gender; dan (2) aksi afirmasi. Strategi pertama ditujukan bagi perempuan yang sudah berdaya sehingga diarahkan kepada upaya bagi mereka untuk mencapai tahap kemandirian dalam memberdayakan diri dan orang lain, menuju kesetaraan dan keadilan gender. Strategi kedua (aksi afirmasi) ditujukan bagi perempuan yang belum berdaya agar dapat menjadi berdaya sehingga mampu untuk berpartisipasi sebagai subyek pembangunan, (3) Perlindungan anak dan perempuan, yang kegiatannya terintegrasi dan terpadu (4) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pasangan usia subur yang mengikuti Keluarga Berencana.

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan juga sangat terkait dengan peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik pertama/ Madrasatul Ula dan utama bagi anak-anaknya dalam keluarga, melalui kerjasama dengan suami sebagai mitra sejajar, dalam upaya mewujudkan anak dengan tumbuh kembang yang berkualitas serta menanamkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender sejak anak berusia dini sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat Pemerintah Kota Serang .

Di pihak lain, anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan investasi masa depan bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam rangka mewujudkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa dan terlindungi, maka pembangunan Kota Serang harus memegang prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak anak. Prinsip-prinsip tersebut meliputi non-diskriminasi, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, perlindungan dan menghargai partisipasi anak.

Perencanaan strategis PD mutlak diperlukan sejalan pendekatan perencanaan pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DP3AKB sebagai Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana kerja jangka waktu 5 (lima) tahunan, merujuk kepada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 Ayat 1, yakni menyusun rencana strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 1 Ayat 7 dalam ketentuan umum menetapkan bahwa Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang.

Perencanaan strategis menentukan arah suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, Daerah yang diturunkan kedalam perangkat daerah, dalam metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas, sasaran dan target. Secara umum Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang 2018-2023 merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun.

Selanjutnya penjabaran Renstra Perangkat daerah lima tahunan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang mencakup Program/ Kegiatan Perangkat daerah dalam masa 1 (satu) tahunan. Rencana Kerja menjadi bagian yang teramat penting dari Pelaksanaan Program dan Kegiatan, mengingat

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang merupakan salah satu perangkat daerah (PD) yang dalam menjalankan roda pemerintahan didasarkan kepada kebijakan umum daerah Kota Serang. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi Daerah tentunya diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, peningkatan daya guna, potensi dan keanekaragaman sumber daya daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan landasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419).
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
12. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748).
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
18. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
20. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
21. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
24. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 Tahun 2011.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri N0. 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
30. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
31. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang No.3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023
32. Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Keluarga Berencana Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
33. Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)

34. Peraturan Walikota Kota Serang Nomor 117 Tahun 2021, Tentang Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Penyusunan Dokumen Perubahan ke-2 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang dimaksudkan untuk menjalankan visi, misi, Kepala daerah yang diturunkan dalam tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bagi pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Masyarakat serta pelayanan program Keluarga Berencana yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang 2018-2023 serta Kebijakan Nasional sesuai kebutuhan sektoral.

TUJUAN

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang 2018-2023 dalam menjalankan organisasinya.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang 2018-2023 dalam menjalankan Rencana Kerja selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan secara kontinyu/berkelanjutan.
3. Memudahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang dalam melakukan pengendalian terhadap pencapaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan karena Program/ Kegiatan yang direncanakan dalam Renstra telah terukur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang 2018-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas, fungsi dan Struktur) organisasi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian kinerja dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas dalam pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan Tantangan serta peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah yang perlu dilakukan melalui Renstra Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra K/L dan Renstra Propinsi, telaah RTRW dan KLHS dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan perumusan rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP.

Bab ini menguraikan tentang pengantar penutup dokumen renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

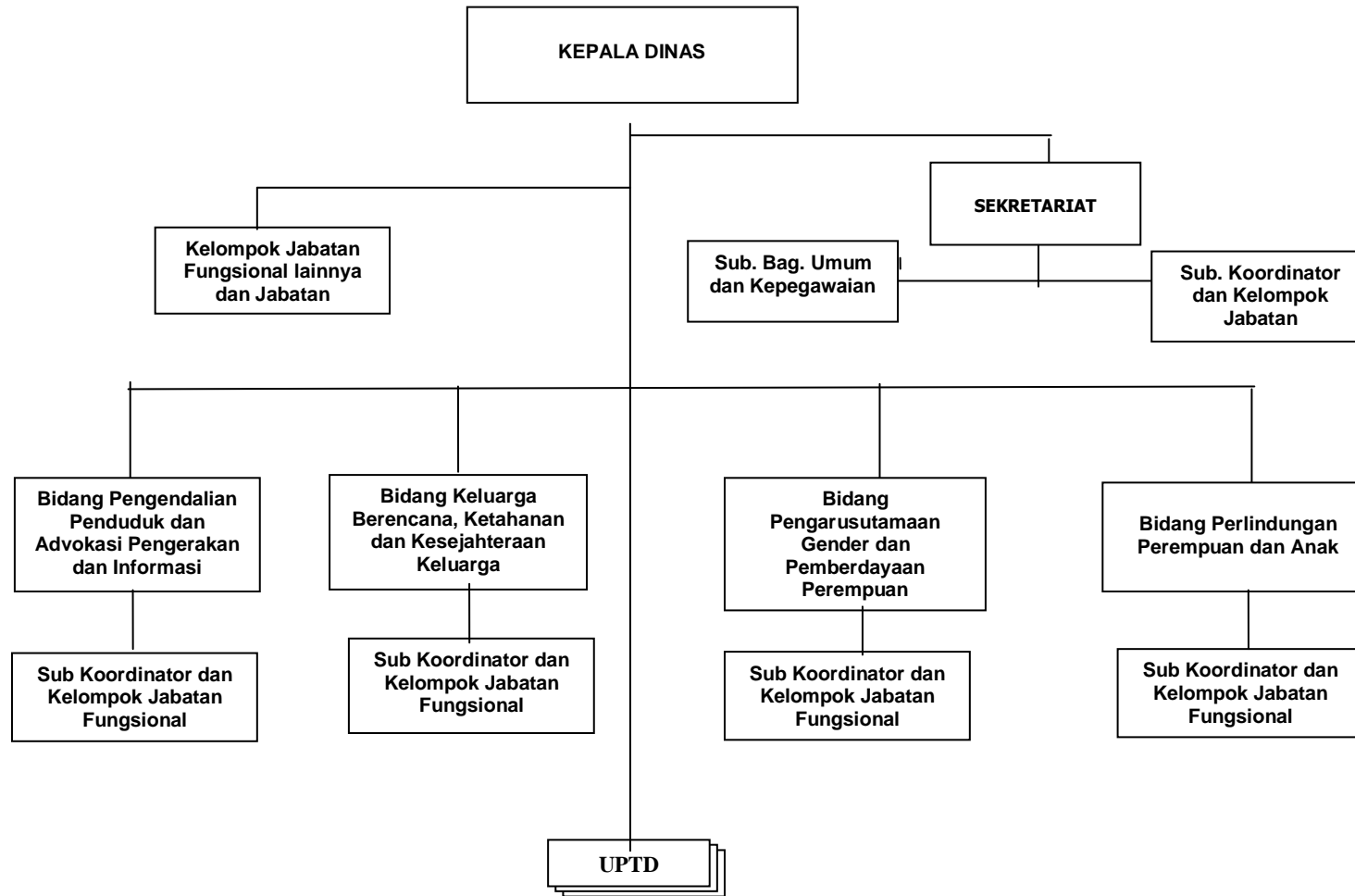
2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Pasal 4 menyebutkan bahwa: DP3AKB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pelayanan Keluarga Berencana, membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2.1.2. Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan ;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi, membawahkan : Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan : Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan membawahkan: Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan : Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Jabatan Pelaksana
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Gambar 2.1
Struktur ORGANISASI Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Wajib non pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pelayanan Program Keluarga Berencana. DP3AKB dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Uraian Tugas dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Administrator serta Pengawas Perangkat Daerah. Uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana meliputi:

1. Kepala Dinas

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai rincian Tugas sebagai berikut :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi serta Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi serta Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi serta Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi serta Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 5) Pengelolaan UPT; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - d. Menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani kepala dinas dalam urusan kedinasan;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - f. Pelaporan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
 - a. Melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah dinas;
 - c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
 - d. Melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada dinas;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
 - i. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang;
 - j. Melaksanakan pengelolaan barang/perengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapihan ruangan kantor;
 - l. Melaksanakan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dan Advokasi Penggerakan Dan Informasi

- 1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengendalian penduduk dan advokasi penggerakan dan informasi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Penggerakan dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi;
- b. Penyelenggaraan pergerakan dan pendayagunaan penyuluh keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- c. Penyelenggaraan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga;
- d. Pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi Pergerakan dan Informasi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- 1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - b. Penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
 - c. Penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. Pelaporan di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- 1) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
 - c. Penyelenggaraan Penguatan Lembaga Layanan dan Kualitas Keluarga;
 - d. Pelaporan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

- 1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan perlindungan perempuan dan anak.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perlindungan perempuan;
 - b. Penyelenggaraan pemenuhan hak anak;
 - c. Penyelenggaraan perlindungan khusus anak;
 - d. Pelaporan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah

- 1) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatan dan pemberhentiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

10. Jabatan Pelaksana

- 1) Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada masing-masing Bidang tempat Jabatan Pelaksana yang bersangkutan bekerja.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Keberdayaan daerah antara lain dapat dilihat dari kapabilitas aparatur, yaitu yang berhubungan dengan keberadaan dan upaya peningkatan aparatur. Indikator ini ditunjukkan dengan: (1) Tingkat pendidikan aparatur yang digambarkan dengan persentase jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, (2) Perkembangan jumlah aparatur, dan (3) Tingkat kreativitas aparatur.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan urusan yang diemban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang didukung oleh pegawai saat ini yang tercatat sebanyak 36 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

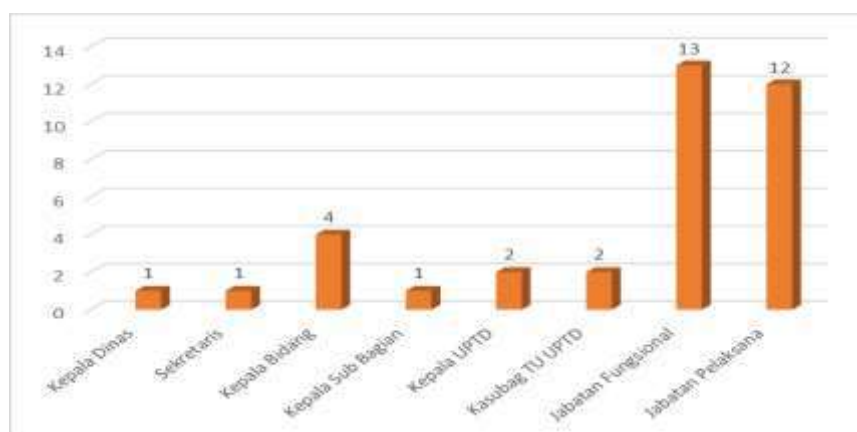
Jumlah Pegawai DP3AKB Berdasarkan Jenis Jabatan

1.	Kepala Dinas	:	1	Orang
2.	Sekretaris	:	1	Orang
3.	Kepala Bidang	:	4	Orang
4.	Kepala Sub Bagian	:	1	Orang
5.	Kepala UPTD	:	2	Orang
6.	Ka. Subbag TU UPTD	:	2	Orang
7.	Jabatan Fungsional	:	13	Orang
6.	Jabatan Pelaksana	:	12	Orang
	JUMLAH	:	36	Orang

Sedangkan kalau digambarkan dengan grafik jumlah pegawai (PNS) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah sebagaimana terlihat dalam grafik 2.1 dibawah ini :

Grafik 2.1

Jumlah Pegawai DP3AKB Berdasarkan Jenis Jabatan



Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai DP3AKB sudah S2 dan S1, dan hanya sebagian kecil saja yang D3 dan SMA, sebagaimana digambarkan pada grafik 2.2 berikut

Ini :

Grafik 2.2
Jumlah Pegawai DP3AKB Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan ruang, pegawai DP3AKB sebagian besar adalah golongan ruang III & IV dengan pangkat yang bervariasi. Hanya sebagian kecil yang masih golongan ruang II, sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai DP3AKB Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

• Golongan IV	:		
a. Gol IV/a	:	11	Orang
b. Gol IV/b	:	2	Orang
c. Gol IV/c	:	1	Orang
• Golongan III	:		
a. Gol III/a	:	8	Orang
b. Gol III/b	:	2	Orang
c. Gol III/c	:	2	Orang
d. Gol III/d	:	7	Orang
• Golongan II	:		
a. Gol II/c	:	2	Orang
b. Gol II/d	:	1	Orang
• Magang	:	32	Orang
JUMLAH	:	64	Orang

Sementara itu apabila dilihat berdasarkan Jenis jabatan pegawai DP3AKB terdiri dari :

• Jabatan Struktural	:	11	Orang
• Jabatan Fungsional	:	13	Orang
• Jabatan Pelaksana	:	12	Orang
JUMLAH	:	36	Orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Sumberdaya yang dimiliki dapat didayagunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi melalui kemampuan dan kualitas aparatur dalam usahanya melakukan pelayanan publik pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pelayanan Keluarga Berencana. Saat ini prasarana dan sarana kerja yang dimiliki, meliputi berbagai bentuk kebendaan seperti tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Daftar Inventaris

NO	Nama Barang	Jumlah Barang	Baik	Rusak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	18
1	Tanah Lapangan Untuk Fasilitas Sosial dan Umum	1	√	-	445,550,000	445,550,000
2	Pompa Air	1	√	-	4,027,631	4,027,631
3	Sepeda Motor	1	√	-	22,330,100	22,330,100
4	Sepeda Motor	1	√	-	24,940,000	24,940,000
5	Sepeda Motor	1	√	-	24,940,000	24,940,000
6	Sepeda Motor	1	√	-	24,940,000	24,940,000
7	Sepeda Motor	1	√	-	24,940,000	24,940,000
8	Sepeda Motor	1	√	-	24,940,000	24,940,000
9	Mobil Unit Labfor	1	√	-	232,950,000	232,950,000
10	Lemari Penyimpan	1	√	-	13,911,950	13,911,950
11	Lemari Penyimpan	1	√	-	13,911,950	13,911,950
12	Lemari Penyimpan	1	√	-	13,911,950	13,911,950
13	Lemari Penyimpan	1	√	-	13,911,950	13,911,950
14	Lemari Penyimpan	1	√	-	13,911,950	13,911,950
15	Lemari Penyimpan	1	√	-	13,911,950	13,911,950
16	Lemari Penyimpan	1	√	-	13,911,950	13,911,950
17	Lemari Penyimpan	1	√	-	13,911,950	13,911,950
18	Lemari Penyimpan	1	√	-	13,911,950	13,911,950

NO	Nama Barang	Jumlah Barang	Baik	Rusak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	18
19	Lemari Penyimpan	1	√	-	13,911,950	13,911,950
20	Lemari Penyimpan	1	√	-	13,953,500	13,953,500
21	Lemari Penyimpan	1	√	-	13,953,500	13,953,500
22	Lemari Penyimpan	1	√	-	13,953,500	13,953,500
23	Lemari Penyimpan	1	√	-	13,953,500	13,953,500
24	Lemari Penyimpan	1	√	-	13,953,500	13,953,500
25	Lemari Penyimpan	1	√	-	13,953,500	13,953,500
26	Mesin Ketik Elektronik/ Selektrik	1	√	-	2,800,000	2,800,000
27	Mesin Ketik Elektronik/ Selektrik	1	√	-	2,800,000	2,800,000
28	Mesin Ketik Elektronik/ Selektrik	1	√	-	2,800,000	2,800,000
29	Mesin Ketik Elektronik/ Selektrik	1	√	-	2,800,000	2,800,000
30	Mesin Ketik Elektronik/ Selektrik	1	√	-	2,800,000	2,800,000
31	Lemari Sorok	1	√	-	14,840,000	14,840,000
32	Lemari Sorok	1	√	-	14,840,000	14,840,000
33	Lemari Sorok	1	√	-	14,840,000	14,840,000
34	Lemari Sorok	1	√	-	14,840,000	14,840,000
35	Lemari Sorok	1	√	-	14,840,000	14,840,000
36	CCTV - Camera Control Television System	1	√	-	7,525,500	7,525,500
37	Papan Visual/Papan Nama	1	√	-	18,677,142	18,677,142
38	Papan Visual/Papan Nama	1	√	-	3,725,558	3,725,558
39	Mesin Absensi	1	√	-	6,041,446	6,041,446
40	Papan Pengumuman	1	√	-	83,000,000	83,000,000
41	Papan Pengumuman	1	√	-	59,285,000	59,285,000
42	Papan Pengumuman	1	√	-	14,709,150	14,709,150
43	Papan Pengumuman	1	√	-	14,709,150	14,709,150
44	Papan Pengumuman	1	√	-	14,709,150	14,709,150
45	Papan Pengumuman	1	√	-	14,709,150	14,709,150
46	Papan Pengumuman	1	√	-	14,709,150	14,709,150
47	Jam Elektronik	1	√	-	1,208,289	1,208,289
48	Jam Elektronik	1	√	-	1,208,289	1,208,289
49	Mesin Pemotong Rumput	1	√	-	4,436,000	4,436,000
50	AC Sentral	1	√	-	12,082,892	12,082,892
51	AC Sentral	1	√	-	12,082,892	12,082,892
52	AC Split	1	√	-	5,449,723	5,449,723
53	AC Split	1	√	-	5,449,723	5,449,723

NO	Nama Barang	Jumlah Barang	Baik	Rusak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	18
54	AC Split	1	√	-	5,449,723	5,449,723
55	AC Split	1	√	-	5,449,723	5,449,723
56	AC Split	1	√	-	5,449,723	5,449,723
57	AC Split	1	√	-	5,449,723	5,449,723
58	AC Split	1	√	-	5,449,723	5,449,723
59	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	√	-	8,728,500	8,728,500
60	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	√	-	5,200,000	5,200,000
61	Tiang Bendera	1	√	-	3,545,322	3,545,322
62	Alat Pemadam/Portable	1	√	-	1,812,434	1,812,434
63	Alat Pemadam/Portable	1	√	-	1,812,434	1,812,434
64	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	√	-	1,305,158	1,305,158
65	Camera Electronic	1	√	-	6,276,721	6,276,721
66	Camera Electronic	1	√	-	6,276,721	6,276,721
67	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
68	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
69	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
70	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
71	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
72	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
73	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
74	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
75	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
76	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
77	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
78	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
79	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
80	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
81	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
82	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
83	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
84	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
85	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
86	Speculum Model Kit	1	√	-	4,386,859	4,386,859
87	Speculum Model Kit	1	√	-	4,972,000	4,972,000
88	Speculum Model Kit	1	√	-	4,972,000	4,972,000
89	Speculum Model Kit	1	√	-	4,972,000	4,972,000
90	Speculum Model Kit	1	√	-	4,972,000	4,972,000

NO	Nama Barang	Jumlah Barang	Baik	Rusak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	18
91	Speculum Model Kit	1	√	-	4,972,000	4,972,000
92	Speculum Model Kit	1	√	-	4,972,000	4,972,000
93	Speculum Model Kit	1	√	-	4,431,579	4,431,579
94	Speculum Model Kit	1	√	-	4,431,579	4,431,579
95	Speculum Model Kit	1	√	-	4,431,579	4,431,579
96	Speculum Model Kit	1	√	-	4,431,579	4,431,579
97	Speculum Model Kit	1	√	-	4,431,579	4,431,579
98	Speculum Model Kit	1	√	-	4,431,579	4,431,579
99	Speculum Model Kit	1	√	-	4,431,579	4,431,579
100	Speculum Model Kit	1	√	-	4,431,579	4,431,579
101	Speculum Model Kit	1	√	-	4,431,579	4,431,579
102	Speculum Model Kit	1	√	-	4,431,579	4,431,579
103	Speculum Model Kit	1	√	-	4,431,579	4,431,579
104	Speculum Model Kit	1	√	-	4,431,579	4,431,579
105	Speculum Model Kit	1	√	-	4,431,579	4,431,579
106	Speculum Model Kit	1	√	-	4,431,579	4,431,579
107	Speculum Model Kit	1	√	-	4,431,579	4,431,579
108	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
109	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
110	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
111	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
112	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
113	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
114	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
115	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
116	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
117	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
118	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
119	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
120	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
121	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
122	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
123	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
124	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
125	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
126	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
127	Trocar Implan	1	√	-	3,648,161	3,648,161
128	Trocar Implan	1	√	-	3,971,000	3,971,000

NO	Nama Barang	Jumlah Barang	Baik	Rusak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	18
129	Trocar Implan	1	√	-	3,971,000	3,971,000
130	Trocar Implan	1	√	-	3,971,000	3,971,000
131	Trocar Implan	1	√	-	3,971,000	3,971,000
132	Trocar Implan	1	√	-	3,971,000	3,971,000
133	Trocar Implan	1	√	-	3,971,000	3,971,000
134	Trocar Implan	1	√	-	3,988,716	3,988,716
135	Trocar Implan	1	√	-	3,988,400	3,988,400
136	Trocar Implan	1	√	-	3,988,400	3,988,400
137	Trocar Implan	1	√	-	3,988,400	3,988,400
138	Trocar Implan	1	√	-	3,988,400	3,988,400
139	Trocar Implan	1	√	-	3,988,400	3,988,400
140	Trocar Implan	1	√	-	3,988,400	3,988,400
141	Trocar Implan	1	√	-	3,988,400	3,988,400
142	Trocar Implan	1	√	-	3,988,400	3,988,400
143	Trocar Implan	1	√	-	3,988,400	3,988,400
144	Trocar Implan	1	√	-	3,988,400	3,988,400
145	Trocar Implan	1	√	-	3,988,400	3,988,400
146	Trocar Implan	1	√	-	3,988,400	3,988,400
147	Trocar Implan	1	√	-	3,988,400	3,988,400
148	Trocar Implan	1	√	-	3,988,400	3,988,400
149	Gynecological Examining Table	1	√	-	14,924,136	14,924,136
150	Gynecological Examining Table	1	√	-	14,924,136	14,924,136
151	Gynecological Examining Table		√	-	14,924,136	14,924,136
152	Gynecological Examining Table		√	-	14,924,136	14,924,136
153	Gynecological Examining Table		√	-	14,924,136	14,924,136
154	Gynecological Examining Table		√	-	14,924,136	14,924,136
155	Gynecological Examining Table	1	√	-	14,924,136	14,924,136
156	Gynecological Examining Table	1	√	-	14,510,000	14,510,000
157	Gynecological Examining Table	1	√	-	14,510,000	14,510,000
158	Gynecological Examining Table	1	√	-	14,510,000	14,510,000
159	Gynecological Examining Table	1	√	-	14,510,000	14,510,000
160	Gynecological Examining Table	1	√	-	14,510,000	14,510,000
161	Gynecological Examining Table	1	√	-	14,510,000	14,510,000

NO	Nama Barang	Jumlah Barang	Baik	Rusak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6	18
162	Gynecological Examining Table	1	√	-	14,510,000	14,510,000
163	Gynecological Examining Table	1	√	-	14,510,000	14,510,000
164	Gynecological Examining Table	1	√	-	14,510,000	14,510,000
165	TV Monitor	1	√	-	2,796,279	2,796,279
166	TV Monitor	1	√	-	2,796,279	2,796,279
167	Personal Computer	1	√	-	9,080,000	9,080,000
168	Meja Kerja	1	√	-	2,960,000	2,960,000
169	Kamera Digital	1	√	-	7,551,807	7,551,807
170	Kamera Digital	1	√	-	7,551,807	7,551,807
171	PC Unit	1	√	-	8,000,000	8,000,000
172	PC Unit	1	√	-	8,000,000	8,000,000
173	PC Unit	1	√	-	8,000,000	8,000,000
174	PC Unit	1	√	-	8,000,000	8,000,000
175	PC Unit	1	√	-	13,051,576	13,051,576
176	PC Unit	1	√	-	15,994,000	15,994,000
177	PC Unit	1	√	-	15,994,000	15,994,000
178	PC Unit	1	√	-	15,994,000	15,994,000
179	PC Unit	1	√	-	15,994,000	15,994,000
180	PC Unit	1	√	-	15,994,000	15,994,000
181	PC Unit	1	√	-	15,994,000	15,994,000
182	Lap Top	1	√	-	5,100,000	5,100,000
183	Lap Top	1	√	-	5,100,000	5,100,000
184	Lap Top	1	√	-	5,100,000	5,100,000
185	Lap Top	1	√	-	5,100,000	5,100,000
186	Lap Top	1	√	-	8,558,715	8,558,715
187	Lap Top	1	√	-	8,558,715	8,558,715
188	Lap Top	1	√	-	8,558,715	8,558,715
189	Lap Top	1	√	-	14,704,500	14,704,500
190	Lap Top	1	√	-	14,704,500	14,704,500
191	Lap Top	1	√	-	14,704,500	14,704,500
192	Lap Top	1	√	-	14,704,500	14,704,500
193	Lap Top	1	√	-	14,704,500	14,704,500
194	Lap Top	1	√	-	14,704,500	14,704,500
195	Lap Top	1	√	-	14,704,500	14,704,500
196	Lap Top	1	√	-	14,704,500	14,704,500
197	Lap Top	1	√	-	14,704,500	14,704,500
198	Lap Top	1	√	-	14,704,500	14,704,500

NO	Nama Barang	Jumlah Barang	Baik	Rusak	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>18</i>	
199	Lap Top	1	√	-	14,704,500	14,704,500	
200	Lap Top	1	√	-	14,704,500	14,704,500	
201	Lap Top	1	√	-	14,704,500	14,704,500	
202	Note Book	1	√	-	10,890,000	10,890,000	
203	Note Book	1	√	-	10,890,000	10,890,000	
204	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	4,100,000	4,100,000	
205	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	4,100,000	4,100,000	
206	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	4,100,000	4,100,000	
207	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	4,100,000	4,100,000	
208	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	4,100,000	4,100,000	
209	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	4,782,811	4,782,811	
210	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	4,782,811	4,782,811	
211	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	4,782,811	4,782,811	
212	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	4,782,811	4,782,811	
213	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	4,782,811	4,782,811	
214	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	3,863,266	3,863,266	
215	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	3,289,000	3,289,000	
216	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	3,289,000	3,289,000	
217	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	3,289,000	3,289,000	
218	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	3,410,000	3,410,000	
219	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	3,410,000	3,410,000	
220	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	3,410,000	3,410,000	
221	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	3,410,000	3,410,000	
222	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	3,410,000	3,410,000	
223	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	√	-	3,410,000	3,410,000	
224	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	√	-	985,606,545	985,606,545	
		JUMLAH					3.569.216.945

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dalam kapasitasnya sebagai institusi pengembangan khususnya bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pelayanan Keluarga Berencana. Sebagai satuan kerja yang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah yang memiliki tugas pokok dalam mensukseskan dan membantu Walikota dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan dan masyarakat serta keluarga berencana menjadi hal penting yang patut menjadi perhatian bagi meningkatnya peran dan fungsi DP3AKB sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah. Peningkatan kinerja DP3AKB dalam Pencapaian Pelayanan 2018-2023 sebagai berikut :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisa tantangan dan peluang dalam pembangunan pelayanan dilakukan :

1. Menggunakan analisa SWOT yaitu melihat kekuatan internal dan ancaman eksternal.
2. Menganalisis dengan IFAS dan EFAS untuk menghitung posisi perbandingan antara kekuatan dengan kelemahan dan peluang dengan ancaman
3. Membuat matrik kuadran untuk menentukan posisi tahapan strategi yang di terapkan pilihannya ada 4 yaitu : progresif, stabilitas, diversifikasi dan survival.
4. Menggunakan analisa TOWS yaitu melihat kombinasi strategi yang tepat setelah melihat kekuatan dan ancaman
5. Menetapkan strategi dari hasil analisa TOWS

Berikut ini uraian dari strategi tersebut :

1. Menggunakan analisa SWOT yaitu melihat kekuatan internal dan ancaman eksternal.

Tabel 2.4 Analisa kekuatan

KEKUATAN	
1	Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah pemberdayaan perempuan dan masyarakat
2	Adanya komitmen pejabat dan masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
3	Adanya komitmen pejabat dan masyarakat untuk mensukseskan program keluarga berencana

Tabel 2.5 Analisa Kelemahan

KELEMAHAN	
1	Belum tersedianya peraturan daerah (Perda) dan peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur teknis perlindungan perempuan dan anak
2	Belum memadainya sarana prasarana pendukung dalam Pemberdayaan dan perlindungan perempuan
3	Belum optimalnya kinerja SDM bidang Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan dan anak
4	Belum memadainya sistem teknologi informasi

Tabel 2.6 Analisa Peluang

PELUANG	
1	Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan perempuan
2	Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk terus mensukseskan program keluarga berencana

Tabel 2.7 Analisa Ancaman

ANCAMAN	
1	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Peran perempuan
2	Adanya persepsi masyarakat tentang sulitnya perlindungan perempuan dan anak
3	Adanya potensi tidak efektifnya pemberdayaan perempuan dan masyarakat

2. Menganalisis dengan IFAS dan EFAS untuk menghitung posisi perbandingan antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Tabel 2.8 Analisa Faktor Internal

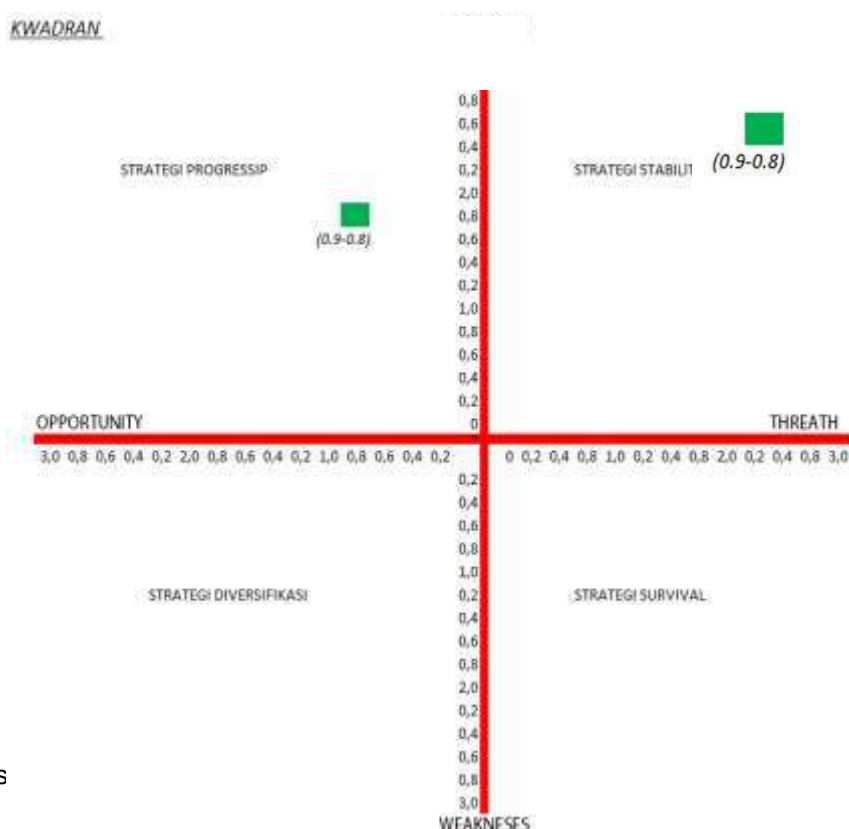
	KEKUATAN	BOBOT	SCORE	TOTAL
1	Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah pemberdayaan perempuan dan masyarakat	0,2	3	0,6
2	Adanya komitmen pejabat dan masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	0,4	4	1,6
3	Adanya komitmen pejabat dan masyarakat untuk mensukseskan program keluarga berencana	0,4	3	1,2
	TOTAL	100%		3,4
	KELEMAHAN	BOBOT	SKORE	TOTAL
1	Belum tersedianya peraturan daerah (Perda) dan peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur teknis perlindungan perempuan dan anak	0,3	2	0,6
2	Belum memadainya sarana prasarana pendukung dalam Peemberdayaan dan perlindungan perempuan	0,3	3	0,9
3	Belum optimalnya kinerja SDM bidang Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan dan anak	0,2	2	0,4
4	Belum memadainya sistem teknologi informasi	0,2	3	0,6
		1		2,5
	FINAL SCORE			0,9

Tabel 2.9 Analisa Faktor Eksternal

PELUANG		BOBOT	SCORE	TOTAL
1	Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan perempuan	0,5	3	1,5
2	Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk terus mensukseskan program keluarga berencana	0,5	2	1
TOTAL		1		2,5
ANCAMAN		BOBOT	SCORE	TOTAL
1	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Peran perempuan	0,4	3	1,2
2	Adanya persepsi masyarakat tentang sulitnya perlindungan perempuan dan anak	0,3	3	0,9
3	Adanya potensi tidak efektifnya pemberdayaan perempuan dan masyarakat	0,3	4	1,2
		1		3,3
FINAL SCORE				-0,8

- Membuat matrik kuadran untuk menentukan posisi tahapan strategi yang di terapkan pilihannya ada 4 yaitu : progresif, stabilitas, diversifikasi dan survival.

Grafik 2.3 Kuadran strategi



Hasil dari analisa berada pada kwadran strategi Stabilitas yang maknanya terdapat peluang keberhasilan yang di iringi dengan ancaman yang juga besar sehingga agenda yang harus dilakukan adalah 1. Menguatkan kegiatan yang sudah sesuai sasaran kinerjanya 2. Menjaga konsistensi dan stabiitas kegiatan sampai pada target kinerja yang ingin dicapai. 3. Bekerjasama dengan berbagai pihak dan mitra strategis untuk memperkecil pengaruh ancaman dan 4. Selalu evaluasi terhadap konsisten dan stabilitas kinerja yang ingin dicapai

4. Menggunakan analisa TOWS yaitu melihat kombinasi strategi yang tepat setelah melihat kekuatan dan ancaman

Tabel 2.10 Analisa TOWS

		KEKUATAN	KELEMAHAN
		1 Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah pemberdayaan perempuan dan masyarakat	1 Belum tersedianya peraturan daerah (Perda) dan peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur teknis perlindungan perempuan dan anak
	MATRIK TOWS	2 Adanya komitmen pejabat dan masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	2 Belum memadainya sarana prasarana pendukung dalam Peemberdayaan dan perlindungan perempuan
		3 Adanya komitmen pejabat dan masyarakat untuk mensukseskan program keluarga berencana	3 Belum optimalnya kinerja SDM bidang Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan dan anak
			4 Belum memadainya sistem teknologi informasi

PELUANG	STRATEGI S - O	STRATEGI W - O
1 Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan perempuan	S,2,3- O,1,2 Menguatkan rencana kerja dengan sistem pengendalian kinerja	W,2- O,1,2 Penyediaan sarpras untuk Perlindungan perempuan dan anak
2 Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk terus mensukseskan program keluarga berencana	S,1-O,1,2 Implementasi regulasi yang mendukung percepatan pengembangan pemberdayaan perempuan dan masyarakat	W,1,3, 4- O,1,2 Implementasi teknologi informasi dalam perlindungan perempuan dan pelayanan program keluarga berencana
ANCAMAN	STRATEGI S - T	STRATEGI W - T
1 Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Peran perempuan	S,2,3 - T,1,2 Optimalisasi SDM dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta pelaksanaan program keluarga berencana	W,1- T,1,2 Mengembangkan regulasi yang tepat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak
2 Adanya persepsi masyarakat tentang sulitnya perlindungan perempuan dan anak	S,1-T,2 Implementasi regulasi yang mendukung perlindungan perempuan dan anak	W,2,4- T,2,3 Meningkatkan sarana prasarana dengan Implementasi Teknologi informasi untuk efektifas perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan dan masyarakat
3 Adanya potensi tidak efektifnya pemberdayaan perempuan dan masyarakat	S,1-T,3 Implementasi regulasi yang mendukung efektifitas pemberdayaan perempuan dan masyarakat	W,3- T,1,2, 3 Meningkatkan kompetensi, disiplin dan kreatifitas SDM dalam Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan dan anak

5. Menetapkan strategi dari hasil analisa TOWS

Terdapat empat kwadran strategi yang masing masing telah ditemukan langkahnya dalam kwadran yang berbeda dengan delapan strategi yaitu :

- A. Kombinasi S-O Kwadran Progresif rekomendasi strateginya adalah
 - a. Memperkuat rencana kerja dengan sistem pengendalian kinerja
 - b. Implementasi regulasi yang mendukung percepatan pengembangan pemberdayaan perempuan dan masyarakat.

- B. Kombinasi S-T Kwadran Diversifikasi rekomendasi strateginya adalah :
 - a. Optimalisasi SDM dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta pelaksanaan program keluarga berencana.
 - b. Implementasi regulasi yang mendukung perlindungan perempuan dan anak.
 - c. Implementasi regulasi yang mendukung efektifitas pemberdayaan perempuan dan masyarakat.

- C. Kombinasi W-O kwadran Stabilitas rekomendasinya adalah :
 - a. Penyediaan sarpras untuk Perlindungan perempuan dan anak
 - b. Implementasi teknologi informasi dalam perlindungan perempuan dan pelayanan program keluarga berencana.

- D. Kombinasi W-T kwadran Survival rekomendasinya adalah :
 - a. Mengembangkan regulasi yang tepat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak.
 - b. Meningkatkan sarana prasarana dengan Implementasi Teknologi informasi untuk efektifas perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan dan masyarakat.
 - c. Meningkatkan kompetensi, disiplin dan kreatifitas SDM dalam Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan dan anak.

Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Serang Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK/SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun						Realisasi Capaian Renstra PD Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.1	Persentase partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah				26.89	27.5	28	28.7	29.5	31	NA	NA	NA	6.16	6.01	23				21.463	20.373	74.194
2.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta				73.11	74.25	76	76.75	77.25	77.9	NA	NA	NA	69.03	70.1	77				89.941	90.744	98.845
2.3	Rasio KDRT				0.07	0.065	0.06	0.055	0.05	0.046	4.67	5.10	4.55	5.68	5.94	0.98	6669.6	7841	7579.5	10318	11878	2130.4
2.4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur				6.12	6.05	6	5.85	5.65	5.51	NA	NA	NA	5.85	4.54	3.72				100	80.354	67.514
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan				11.15	11.5	11.75	12	12.25	12.6	NA	NA	NA	44.54	45.34	45.94				371.17	370.12	364.6
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu										NA	NA	NA	52.63	92.08	75						
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit										NA	NA	NA	26.32	34.65	71.43						
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.										NA	NA	NA	52.63	92.08	76.47						
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak										NA	NA	NA	72.5	68.63	57.14						
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum										NA	NA	NA	31.58	79.21	100						

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK/SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun						Realisasi Capaian Renstra PD Tahun						Rasio Capaian pada Tahun							
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan										NA	NA	NA	73.68	97.03	65								
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan										NA	NA	NA	52.63	95.05	100								
2.13	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun										NA	NA	NA	NA	97.47	52								
2.14	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian										NA	NA	NA	NA	NA	21.37								
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)										0.08	0.12	0.71	0.76	1	100								
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK										0.98	0.98	1.15	1.18	2	2								
7.3	Persentase LPM aktif										NA	NA	NA	3	1	0								
7.4	Persentase LPM Berprestasi										0	1	1	1	1	1						0		
7.5	Persentase PKK aktif										66	66	66	66	66	66						151.52	151.52	151.52
7.6	Persentase Posyandu aktif										100	100	100	100	100	100								
7.7	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan masyarakat										12	12.5	14	14.5	16	17						100	35.375	33.294
7.8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat										5	5.5	6	6.5	7	7.6						100	80.857	74.474
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)										589.6													
8.2	Total Fertility Rate (TFR)																							
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB										NA	NA	NA	NA	NA	7.4								
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk										NA	NA	NA	NA	NA	NA								
8.5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan										NA	NA	NA	NA	NA	1								

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK/SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun						Realisasi Capaian Renstra PD Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
8.6	Rata-rata jumlah anak per keluarga				2.33	2.3	2.28	2.25	2.2	2.17	1.77	1.82	1.75	1.74	1.27	1.08	75.789	79.155	76.754	77.333	57.727	49.77
8.7	Ratio Akseptor KB				63.8	64.35	65.5	65.75	66	66.25	0.66	0.69	0.72	0.64	0.74	69.5	1.0315	1.0666	1.0992	0.9734	1.1212	104.91
8.8	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49										65.81	68.64	72.36	63.84	74.22	69.5						
8.9	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)										NA	NA	NA	4.9	4.95	1.59						
8.10	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun										NA	NA	NA	51.39	51.08	5.76						
8.11	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)										NA	NA	NA	25.92	26.34	16.5						
8.12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)										4.26	3.49	15.91	16.37	29.65	21.93						
8.13	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi										NA	NA	NA	54.19	47.17	2.2						
8.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB										NA	NA	NA	100	70.08	71.38						
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB										NA	NA	NA	100	60.37	59.76						
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB										NA	NA	NA	100	62.91	60.46						
8.17	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan										NA	NA	NA	0	116.67	100						
8.18	Cakupan Remaja dalam Pusat informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa										NA	NA	NA	NA	15.79	36						
8.19	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk										NA	NA	NA	NA	NA	NA						
8.20	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri										NA	NA	NA	NA	38.15	78						

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK/SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun						Realisasi Capaian Renstra PD Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
8.21	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa / kelurahan										NA	NA	NA	100	98.51	100						
8.22	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat										NA	NA	NA	33.12	37.26	70						
8.23	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan										NA	NA	NA	NA	NA	60						
8.24	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa										NA	NA	NA	NA	NA	66						
8.25	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga										NA	NA	NA	NA	100	80						
8.26	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak										NA	NA	NA	NA	90.24	60						
8.27	Rata-rata usia kawin pertama wanita										NA	NA	NA	34.66	29.25	18						
8.28	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes										NA	NA	NA	NA	NA	65						

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Serang Tahun 2019-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>
2.1	Persentase partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	23	23	15	17	19	34.51	13.09	7.84			150.0	56.9	52.3		
2.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	77	77	36	37	40	32.73	3450	72.19			42.5	4480.5	200.5		
2.3	Rasio KDRT	0.75	0.72	0.0045	0.004	0.0035	0.56	0.0047	0.0044			74.7	0.7	97.8		
2.4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	2	2	0.74	0.73	0.72	1.56	0.75	Nihil			78.0	37.5	#VALUE!		
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	47.79	47.79	64	65	66	48.68	45.94	45.03			101.9	96.1	70.4		
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100	100	100			100.0	100.0	100.0		
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	90	95	100	100	100	94	100	100			104.4	105.3	100.0		
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	85	100	100	100	100	80	100	100			94.1	100.0	100.0		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	26
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkatpenyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100	100			100.0	100.0	100.0		
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	100	100	100			100.0	100.0	100.0		
2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	70	75	80	85	85	60	100	100			85.7	133.3	125.0		
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	90	98	100			90.0	98.0	100.0		
2.13	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	52	55	98.5	99	100	94.75	98	100			182.2	178.2	101.5		
2.14	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	21,366	21,375	28	29	30	22,380	27.53	NA			104.7	0.1	#VALUE!		
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	74	74	100	100	100	100	100	100			135.1	135.1	100.0		
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	74	74	100	100	100	100	100	100			135.1	135.1	100.0		
7.3	Persentase LPM aktif	10	30	100	100	100	10	100	100			100.0	333.3	100.0		
7.4	Persentase LPM Berprestasi	0	1	2	3	4	0	0	2			0.0	0.0	100.0		
7.5	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	100	100			100.0	100.0	100.0		
7.6	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100	100	100			100.0	100.0	100.0		
7.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan masyarakat	5.7	5.75	70	80	90	5.7	64.18	NA			100.0	1116.2	#VALUE!		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	26
7.8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	5.7	5.75	15	20	25	5.7	9.3	NA			100.0	161.7	#VALUE!		
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1.08	1.06	4.3	4.2	4	1.49	4.42	3.11			138.0	417.0	72.3		
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2.47	2.34	2.35	2.32	2.31	2.34	2.37	1.49			94.7	101.3	63.4		
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	14.8	22.2	48	48	48	48	48	50			324.3	216.2	104.2		
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	22.22	24.22	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33			150.0	137.6	100.0		
8.5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	2	3	4	4	5	3	2	2			150.0	66.7	50.0		
8.6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.47	2.34	2.3	2.2	2.1	2.34	2.37	1.24			94.7	101.3	53.9		
8.7	Ratio Akseptor KB	70	72	73.75	74	75	80.14	73.59	76			114.5	102.2	103.1		
8.8	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	70	72	73.75	74	75	80.14	73.59	75.75			114.5	102.2	102.7		
8.9	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	1	1	31	30	29	1	32.5	8.8			100.0	3250.0	28.4		
8.10	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	29.68	29.48	31.25	31	29.5	32.28	32.28	19.16			108.8	109.5	61.3		
8.11	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	16	15.8	15	14	13	11.57	16.53	13.6			72.3	104.6	90.7		
8.12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	61	62	16	16.5	16.9	72.47	15.8	15.4			118.8	25.5	96.3		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	22	23	24	25	26
8.13	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	1.5	1.4	1.3	1.2	1	2.62	1.31	32.01			174.7	93.6	2462.3		
8.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	81	82	84	84.2	85	85.24	83.89	57.96			105.2	102.3	69.0		
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	80	81	91	92	93	83.98	90.38	47.08			105.0	111.6	51.7		
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	78	79	85	86	87	85.75	84.54	38.98			109.9	107.0	45.9		
8.17	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100			100.0	100.0	100.0		
8.18	Cakupan Remaja dalam Pusat informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	38	40	42	44	46	38	38	80.6			100.0	95.0	191.9		
8.19	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	0	66.6	100	100	100	80	100	83.33			#DIV/0!	150.2	83.3		
8.20	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	79	80	87	88	89	88.98	86.55	62.47			112.6	108.2	71.8		
8.21	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa / kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100			100.0	100.0	100.0		
8.22	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	72	75	100	100	100	100	100	100			138.9	133.3	100.0		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>
8.23	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	65	68	91.78	92	92.3	91.43	91.43	91.43			140.7	134.5	99.6		
8.24	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	67	67	67	67	67	67	67	67			100.0	100.0	100.0		
8.25	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	81	82	100	100	100	100	100	100			123.5	122.0	100.0		
8.26	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	65	70	79	80	81	78.85	78.85	11.48			121.3	112.6	14.5		
8.27	Rata-rata usia kawin pertama wanita	19	21	21	21	21	19	21	21			100.0	100.0	100.0		
8.28	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	70	75	22.5	23	23.5	95.36	21.64	37.77			136.2	28.9	167.9		

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Serang Tahun 2015-2022

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BELANJA	13,865,197,509	15,459,021,152	18,918,876,851	11,723,225,932	13,953,545,705	16,120,078,629	13,199,485,844	14,448,019,554	18,068,729,720	10,948,882,466	12,480,598,944		95.20	93.46	95.51	93.39	89.44		0.16	(0.05)
BELANJA OPERASI	13,095,549,009	14,715,451,152	18,395,485,851	11,363,075,932	13,640,811,144	16,069,972,524	12,468,261,874	13,727,613,004	17,554,405,470	10,599,572,466	12,181,859,444		95.21	93.29	95.43	93.28	89.30		0.23	(0.02)
Belanja Pegawai	4,156,848,707	4,958,771,393	5,101,222,851	4,323,406,032	4,953,752,936	5,298,638,655	4,127,244,214	4,358,902,768	4,823,638,644	4,023,463,266	4,721,837,949		99.29	87.90	94.56	93.06	95.32		27	14
Belanja Barang dan Jasa	8,938,700,302	9,756,679,759	13,294,263,000	7,039,669,900	8,687,058,208	10,771,333,869	8,341,017,660	9,368,710,236	12,730,766,826	6,576,109,200	7,460,021,495		93.31	96.02	95.76	93.42	85.88		21	(11)
BELANJA MODAL	769,648,500	743,570,000	523,391,000	360,150,000	312,734,561	50,106,105	731,223,970	720,406,550	514,324,250	349,310,000	298,739,500		95.01	96.88	98.27	96.99	95.52		(93)	(59)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	588,348,500	599,570,000	447,591,000	360,150,000	312,734,561	50,106,105	550,423,970	578,121,550	440,778,500	349,310,000	298,739,500		93.55	96.42	98.48	96.99	95.52		(91)	(46)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	181,300,000	144,000,000	75,800,000	-	-	-	180,800,000	142,285,000	73,545,750	-	-		99.72	98.81	97.03	0.00			#VALUE!	#VALUE!

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

3.1.1. Identifikasi Permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa setiap institusi pemerintah harus mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya. Kemudian, INPRES ini ditindak lanjuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, yang selanjutnya direvisi dan diganti dengan Peraturan Dalam Negeri No 67 Tahun 2011.

Dengan dikeluarkannya Permendagri ini maka tidak ada alasan lagi bagi setiap daerah untuk mengabaikan pengarusutamaan gender dalam pembangunannya. Sebagai ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang dilandasi oleh Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing tahun 1995 merupakan suatu lompatan besar pemerintah terhadap upaya penghapusan yang menuju pada kesetaraan gender di segala kehidupan. Landasan Aksi Beijing menyebutkan bahwa isu kesenjangan gender yang dialami perempuan ditengarai terjadi pada 12 bidang kehidupan perempuan yaitu gender dan kemiskinan, pendidikan, kesehatan (terutama reproduksi), ekonomi dan ketenagakerjaan, kekerasan terhadap perempuan, konflik bersenjata, hak asasi perempuan, proses pengambilan keputusan, mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan, lingkungan hidup, media dan anak perempuan.

Selain itu, untuk mempercepat implementasi PUG dalam pembangunan daerah, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam implementasi PUG selama ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain ;

- 1) Membuat dasar hukum yang kuat sebagai dasar pelaksanaan implementasi PUG di daerah, mengingat hingga saat ini belum semua daerah memiliki peraturan daerah tentang PUG dalam pembangunan di daerah.
- 2) Meningkatkan pemahaman dan komitmen pejabat di daerah mengenai PUG dan PPRG.
- 3) Membuat kelembagaan yang khusus menangani PUG sehingga implementasi PUG dapat berfungsi secara optimal.
- 4) Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana PPRG di seluruh Perangkat Daerah yang ada di daerah, mengingat PUG harus diimplementasikan di setiap sektor pembangunan di daerah.

- 5) Menyusun Data Terpilah dan mengintegrasikan penyusunan Data Terpilah dalam pendataan semua sektor pembangunan daerah, sehingga dapat dilakukan analisis gender secara memadai sebelum menyusun program dan kegiatan di seluruh sektor tersebut.

Kemampuan perempuan sebagai sumber instrumen baru dalam pembangunan perlu meningkatkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan harus mendalami apa yang sebenarnya mereka hadapi, agar mereka dapat berperan aktif dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk secara maksimal berfungsi sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan di semua bidang dan dalam segenap tingkat kegiatan pembangunan. Demikian pula dalam kegiatan yang tergolong dalam kegiatan perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.

Berperan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki dalam pembangunan berarti perempuan harus dapat mengejar berbagai ketertinggalannya dan mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pembangunan, sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan perempuan di Indonesia.

Kesetaraan gender adalah tujuan kelima dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang ditentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sudah saatnya pemerintah Indonesia memberikan laporan komprehensif tentang kemajuan/ketertinggalan dari tujuan kelima SDG itu. Tujuan kesetaraan gender mengandung enam target, yaitu :

Pertama, mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Kedua, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

Ketiga, menghapuskan semua praktek berbahaya, seperti perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan. Dua isu ini masih kontroversial di Indonesia. Bahkan perkawinan anak perempuan dilegitimasi oleh Undang-Undang Perkawinan yang mengatur 16 tahun sebagai usia perempuan dapat menikah.

Keempat, menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Indikator target kelima ini memang terbatas pada politik di ruang publik, politik parlemen, dan manajerial.

Kelima, menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi. Indikator dari target ini adalah jumlah perempuan berusia 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi yang cukup terkait

dengan penggunaan kontrasepsi, dan kesehatan reproduksi mereka. Indikator ini berkaitan dengan kualitas kesehatan reproduksi perempuan, terutama kematian ibu.

Permasalahan mendasar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat yang diwarnai penafsiran terjemahan ajaran agama yang bias gender. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Beberapa permasalahan penting dalam pembangunan pemberdayaan perempuan :

1. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan
2. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak
4. Kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki
5. Banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak
6. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat

Permasalahan lain terkait kesetaraan dan keadilan gender :

- a. Belum semua PD melaksanakan PPRG
- b. Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legeslatif
- c. Masih ditemukannya perempuan sebagai petugas profesional
- d. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
- e. belum optimalnya pemberdayaan pada lansia (potensial) perempuan
- f. belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan
- g. Belum optimalnya Kapasitas kelembagaan PUG
- h. Regulasi kebijakan tentang penerapan startegi Pemberdayaan Perempuan Terpadu belum optimal.
- i. Masih rendahnya pemahaman eksekutif maupun legislative tentang PUG dan PP sebagai suatu strategi pembangunan, yang menentukan keberhasilan pembangunan disegala bidang.
- j. Kurangnya database kasus dari stakeholders untuk digunakan sebagai informasi perumusan kebijakan, penyusunan program/ kegiatan perlindungan perempuan dan anak.
- k. Belum tersedianya statistic data terpilah per sector pembangunan yang lengkap secara kontinyu.

- I. Belum terbangunnya system informasi data terpadu yang dapat diakses oleh semua pihak, dalam bentuk website.

Permasalahan lain terkait perlindungan hak perempuan :

- a. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
- b. Perempuan banyak menjadi obyek , menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
- c. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
- d. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
- e. Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana

Permasalahan lain terkait perlindungan anak :

- a. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- b. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus cyber crime.
- c. Kapasitas kelembagaan perlindungan anak masih terbatas.

Permasalahan lain terkait tumbuh kembang anak :

- a. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
- b. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
- c. Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
- d. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
- e. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

Sedangkan untuk Program pemberdayaan perempuan belum menyentuh semua elemen perempuan di ranah domestik, ketergantungan terhadap tugasnya di keluarga membuat sebagian perempuan kurang bisa membagi waktu dan membuat skala prioritas yang adil.

Pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat juga dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.
- Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang yang dapat menjamin sustainable development guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna.

Pemberdayaan juga merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya berikut :

1. **Enabling**, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. **Empowering**, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.
3. **Protecting**, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Sedangkan tujuan pemberdayaan masyarakat adalah :

- a. Perbaikan pendapatan (better income). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- b. Perbaikan kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- c. Perbaikan usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnisitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- d. Perbaikan lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- e. Perbaikan kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaikan masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Sedangkan dalam pelaksanaannya, Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan. Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- b. Tahapan pengkajian (assessment). Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (feel needs) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (exchange agent) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

- d. Tahap pemformalisasi rencana aksi. Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyanggah dana.
- e. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.
- f. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- g. Tahap terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.

Tujuan pemberdayaan sendiri merupakan serangkaian proses yang bertujuan memandirikan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, berikut beberapa permasalahan dalam pemberdayaan :

1. Program pemberdayaan perempuan kebanyakan hanya program turunan dan kurang berinovasi sesuai apa yang terjadi dan dihadapi perempuan di daerah, berbeda di daerah pasti berbeda pula masalah teknis yang dihadapi. Beberapa program tersebut salah satunya adalah pengembangan potensi ekonomi mikro, program yang berjalan tidak berkelanjutan dan tidak ada pengawasan yang masif dari pihak pemerintah dalam menyukseskan tujuannya. Tujuan pemberdayaan sendiri merupakan serangkaian proses yang bertujuan memandirikan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu pemerintah memberikan mekanisme pemberdayaan yang diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan hingga akar permasalahan yang dihadapi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Program penanggulangan kemiskinan yang telah banyak masuk ke dalam program kerja tidak sepenuhnya dapat memberikan manfaat bahkan tidak diakses oleh masyarakat miskin, khususnya perempuan. Penelitian yang pernah dilakukan menyebutkan sedikitnya pemanfaatan program pemberdayaan perempuan di tingkat kecamatan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kentalnya budaya patriarki dalam masyarakat, dimana kepala keluarga identik sebagai peran yang melekat pada laki-laki dan umumnya bantuan atau program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ditujukan dengan unit kepala keluarga. Padahal kemiskinan tidak hanya dialami oleh kaum laki-laki. Hal ini diperkuat dengan adanya fakta yang menyatakan bahwa tidak kurang dari 6 juta rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan dan sebagian besar diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan. Bila saja perempuan di sektor domestik dapat diberdayakan maka kesejahteraan bisa tercapai secara maksimal.
3. Program pemberdayaan Kurang banyak menyentuh kalangan perempuan yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi pada sektor domestik. Oleh karenanya perlu adanya peran yang besar yang dilakukan pemerintah dan masyarakat sebagai aktor dalam program pemberdayaan perempuan tersebut agar dapat menyentuh seluruh perempuan di sektor domestik. Menumbuhkan kemandirian masyarakat dan upaya meningkatkan partisipasi pada seluruh elemen masyarakat juga perlu dilakukan dengan memberikan kesempatan perempuan yang tidak tersentuh program dapat mengaksesnya.

3.1.2. Identifikasi Permasalahan Program Keluarga Berencana

Pengertian Program Keluarga Berencana menurut UU No 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Program KB adalah bagian yang terpadu (integral) dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional.

Masalah yang dihadapi beberapa negara berkembang pada saat ini adalah mengurangi jumlah kemiskinan dengan menggunakan berbagai cara baik melalui peningkatan infrastruktur ekonomi seperti membangun jalan, jembatan, pasar, serta

sarana lain, maupun membangun derajat dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Namun demikian kendala utama yang dihadapi hampir semuanya sama, yang umumnya bersumber pada permasalahan kependudukan. Mulai dari masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi serta masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk, yang tidak sebanding dengan daya dukung lingkungan yang dapat mengakibatkan penumpukan penduduk. Permasalahan kependudukan yang begitu rumit sangat berpengaruh pada terhadap factor ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih baik perlu adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Keperhatian akan permasalahan kependudukan melahirkan sebuah konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Pada tahun 1970 didirikanlah BKKBN (Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional) dan diperkenalkan kepada masyarakat. Visi dan Misi Program Keluarga Berencana sebagai sarana pencegahan pembeludakan jumlah penduduk yang berlebihan yang dapat mengakibatkan melambatnya perkembangan suatu Negara. Dengan perkembangan zaman Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional diubah menjadi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dengan diterbitkannya Undang – Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dipercaya untuk membangun tugas pemerintahan.

Berdasarkan catatan BKKBN, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini mencapai 1,49 persen atau setara dengan jumlah penduduk di Singapura. Padahal, pemerintah menargetkan pertumbuhan populasi dapat ditekan menjadi 1,1 persen sedangkan tingkat kelahiran setiap perempuan di Indonesia pada 2010-2015 rata-rata 2-3 anak. Dengan laju seperti itu diprediksi pada 2020-2030 nanti, penduduk berusia produktif akan sangat besar jumlahnya. Disisi lain jumlah penduduk lanjut usia dan anak-anak justru sedikit. Dengan pertumbuhan seperti itu maka ledakan penduduk tidak bisa dihindari lagi.

Perubahan paradigma ini otomatis berimplikasi pada perubahan sistem dan manajemen program pelayanan KB yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Kondisi ini mengharuskan daerah memiliki kesiapan yang matang dalam melayani masyarakat termasuk dalam program nasional. pelayanan KB baik secara pemberian pengetahuan tentang perlunya ikut dalam program KB dalam menjaga membeludaknya jumlah penduduk.

Banyak faktor yang menghambat BKKBN dalam menjalankan program KB, faktor utama menjadi penghambat program KB adalah sosialisasi yang kurang baik kepada masyarakat dan kurangnya fasilitas yang mendukung program KB tersebut. Hambatan yang ditemui dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana

banyak terjadi diberbagai bidang mulai dari tingkat ekonomi, pengetahuan, pendidikan, usia, pengalaman, pekerjaan, jenis kelamin dan umur dari target sasaran masyarakat yang tidak sama sehingga sulit memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya program KB tersebut. Pola pikir yang sudah tertanam pada target sasaran masyarakat yaitu "banyak anak banyak rejeki" juga merupakan faktor penghambat masuknya program KB tersebut. Fasilitas yang kurang memadai, Seperti tempat atau ruangan untuk melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi program Keluarga Berencana (KB). Kurangnya tenaga penyuluh atau PLKB pada saat akan turun ke lokasi menjadi salah satu faktor penghambat dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana. Beberapa permasalahan lain dalam pelaksanaan program keluarga berencana seperti berikut :

- a. Tidak semua posyandu di kelurahan dibekali dengan infrastruktur dan keahlian pemeriksaan KB
- b. Program KB dirasa kurang memadai
- c. Kurangnya presentasi tentang pengetahuan KB di kelurahan, mengakibatkan lemahnya pemahaman masyarakat tentang program KB
- d. Masih kurangnya keyakinan masyarakat terhadap manfaat program KB
- e. Masih kurangnya layanan terhadap kesehatan reproduksi
- f. Kurangnya Program KB dalam menyesuaikan perkembangan masyarakat saat ini
- g. Banyaknya kendala kuantitatif dan kualitatif yang dihadapi pemerintah

Salah satu Program Unggulan adalah Pembentukan Kampung KB yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau setara, melalui program membangun sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Dalam pemerintahan periode 2015-2019 terdapat 6 rancangan strategi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu terwujud yaitu:

- 1) Menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tingkat nasional (persen per tahun) dari 1,38 persen/tahun tahun 2015 menjadi 1,21 persen pada tahun 2019.
- 2) Menurunkan Total Fertility Rate (TFR) perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 pada tahun 2019
- 3) Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) semua metode dari 65,2 persen menjadi 66 persen
- 4) Menurunnya kebutuhan ber KB tidak terlayani/unmetneed dari jumlah pasangan usia subur dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019
- 5) Menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) dari 46 pada tahun 2015 menjadi 38 per 1000 perempuan kelompok usia umur 15-19 tahun pada tahun 2019

- 6) Menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari wanita usia subur dari 7,1 persen tahun 2015 menjadi 6,6 persen tahun 2019.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dikelompokkan masalah pokok dengan uraian masalah dan akar masalah untuk mendapatkan daftar permasalahan yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan tabel sebagai berikut :

TABEL 3.1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	MASIH RENDAHNYA KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	BELUM OPTIMALNYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT	Masih rendahnya realisasi pemberdayaan perempuan dalam bidang politik
			Masih rendahnya realisasi pemberdayaan perempuan dalam bidang perekonomian
			Masih rendahnya realisasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya
			Masih rendahnya realisasi pengembangan LPM dari LPM yang dibina
		BELUM OPTIMALNYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK	Masih Rendahnya Pemenuhan Hak anak dalam ruang publik
			Masih rendahnya realisasi perlindungan perempuan dalam ruang publik
Masih belum optimalnya Realisasi pengembangan sistem informasi gender dan anak			
2	MASIH RENDAHNYA KUALITAS HIDUP KELUARGA	BELUM OPTIMALNYA PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK	Masih rendahnya Realisasi promosi KIE terhadap pasangan usia subur
			Masih rendahnya Realisasi pemenuhan dan penggerakan PLKB dan Kader KB dari kebutuhan
		BELUM OPTIMALNYA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA	Masih rendahnya Realisasi Kesertaan KB dari jumlah pasangan usia subur
			Masih rendahnya Realisasi pelayanan KB MKJP dari kesertaan KB
		MASIH RENDAHNYA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Masih rendahnya Realisasi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga terhadap keluarga aktif
			Realisasi data keluarga yang akurat dari jumlah keluarga

3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. VISI

TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA

KOTA PERADABAN

dimaknai sebagai Civil Society yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri :

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk.
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;
4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;
6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;
7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

KOTA BERDAYA

bermakna Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang

KOTA BERBUDAYA

merupakan setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan

berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas pada penyelenggaraan pemerintahan dan program pelaksanaan pembangunan

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa selama tahun 2019 hingga 2023 Kota Serang diharapkan menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan berkembang dan diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial serta sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama berupa perdagangan, jasa, industri pengolahan, pertanian, perikanan dan pariwisata serta ditunjang oleh standar pelayanan kota berskala metropolitan yang mampu melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah *hinterland*-nya dengan aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan.

Melalui keberdayaan dan kebudayaan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang akan semakin meningkat melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Serang tersebut tercermin melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:

"Aje Kendor Membangun Serang"

Makna slogan Aje Kendor Membangun Serang diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan Peradaban, yang merupakan akronim dari :

Kota Serang yang Partisipatif

adalah kondisi terwujudnya kesatuan pola pikir dan pola tindak dilandasi sikap kebersamaan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan Kota Serang secara baik, benar, dan bertanggung jawab oleh Pemerintah Kota Serang, dunia usaha, dan Warga Kota Serang sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan Pemerintah yang Bersih (Good Governance dan Clean Government).

Kota Serang yang Edukatif

dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan pendidikan dan kependidikan warga Kota Serang secara lebih adil dan merata sehingga memiliki kecerdasan yang memadai, mampu mengatasi masalah pribadi dan sosial dan menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan.

Kota Serang yang Religius

dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang konsisten mematuhi pesan nabi dan pemimpin yang taat pada nilai ketauhidan, yaitu mematuhi pesan agama dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral Bangsa Indonesia sehingga dapat dicapai kemakmuran dunia dan akhirat yang hakiki.

Kota Serang yang Akuntabel

adalah kondisi kebudayaan pemerintahan dan warga Kota Serang yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan akan dilakukan sesuai peran masing-masing serta siap menerima resiko atas perbuatannya sehingga terwujud karakter setiap warga masyarakat Kota Serang, aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan negara Republik Indonesia di Kota Serang yang lainnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan alam dan sosial, serta terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kota Serang yang berDaya saing

adalah suatu kondisi lingkungan institusi dan masyarakat Kota Serang yang memiliki keunggulan comparative (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dalam adaptasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang perkembangan dunia global, pemberlakuan MEA, dan Nasional.

Kota Serang yang berBudaya

adalah kondisi lingkungan fisik kota dan lingkungan warga Kota Serang yang tertata, teratur, rapih, indah, taat azas dan tata aturan berdasarkan kesadaran akal sehat sehingga tercipta budaya dan kebudayaan yang

melekat pada setiap warga negara dan tercipta hubungan harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama.

Kota Serang yang Aman

dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang tidak terganggu oleh sikap dan perbuatan yang dapat merugikan secara fisik dan psikis sehingga bebas untuk beraktifitas memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek (self-help) secara bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Kota Serang yang Nyaman

adalah suatu keadaan kehidupan warga Kota Serang telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari hari) dan kelegaan (karena terpenuhinya kebutuhan sehari hari) serta transcendent (keadaan yang melampaui pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah).

Dalam melaksanakan visi tersebut didukung potensi yang ada di Kota Serang, yaitu :

POTENSI PERDAGANGAN DAN JASA

merupakan manifestasi dari komitmen dan upaya untuk merevitalisasi sektor perdagangan dan jasa yang secara historis pernah tumbuh dan berkembang hingga pada skala mancanegara dengan Pelabuhan Karangantu sebagai Bandar utama sekaligus titik pertumbuhannya. Posisi Kota Serang yang berdekatan dengan pintu masuk dan keluar Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, potensi pengembangan kawasan industri padat modal dan berskala besar di wilayah Kota Cilegon, serta potensi berkembang pesatnya perdagangan skala besar di Tangerang dan sekitarnya, maka Kota Serang memiliki kesempatan untuk menjadi titik simpul pertukaran barang dan jasa bagi wilayah-wilayah titik pertumbuhan yang ada di sekitarnya tersebut. Berkembangnya permukiman di Kota Serang saat ini merupakan dampak dari perkembangan perekonomian di titik-titik pertumbuhan dimaksud, yang dapat menjadi indikasi potensial bagi tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa di masa depan.

POTENSI PERTANIAN

masih relevan untuk ditawarkan sebagai visi mengingat bahwa transformasi kota yang baik haruslah berjalan secara alamiah sehingga masyarakat pun dapat ikut beradaptasi dan bertransformasi seiring dengan perkembangan kota. Dalam konteks inilah maka mendayagunakan potensi pertanian (dalam arti luas) yang secara alamiah mengkonstruksi karakteristik fisiologis Kota Serang adalah sebuah pilihan strategis yang memiliki nilai aksiologis tinggi yang dalam jangka menengah dapat menyelamatkan sebagian besar masyarakat Kota Serang yang masih sangat bergantung pada sektor agraris (pertanian, perkebunan, kehutanan) dan maritim (perikanan tangkap dan budidaya), yang pada kedua sektor ini umumnya menjadi kantong-kantong kemiskinan. Kedua, mendayagunakan potensi alamiah yang dimiliki di kedua sektor tersebut guna menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah yang masih banyak terdapat di Kota Serang saat ini. Dan Ketiga, dapat menyelamatkan ekologi Kota Serang yang lebih memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dalam konteks ekologis sebagai kondisi alamiahnya ketimbang didayagunakan sebagai kawasan untuk aktivitas ekonomi sektor sekunder. Dengan demikian sejumlah wilayah persawahan produktif dapat diselamatkan dari alih fungsi lahan yang cenderung tak terkendali. Dalam jangka menengah, revitalisasi pertanian ini juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan Kota Serang sehingga dapat mengurangi dampak dari fluktuasi ekonomi makro terhadap keterpenuhan kebutuhan primer masyarakat Kota Serang. Hal ini juga sejalan dengan nawa cita yang ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui upaya memperkuat swasembada pangan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Kota Serang.

POTENSI BUDAYA

merupakan manifestasi dari komitmen dan upaya untuk: (1) membina dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam kebudayaan daerah untuk direvitalisasi sebagai jatidiri kota dan masyarakat Kota Serang sehingga dapat mewarnai segenap aktivitas dan kehidupan masyarakat sehari-hari, serta mewarnai kehidupan pemerintahan daerah; (2) merevitalisasi nilai-nilai historis Kesultanan Islam Banten yang situsnya berada di wilayah Kota Serang. Upaya revitalisasi itu ditransformasikan pada aktivitas ekonomi kreatif di sektor pariwisata sehingga memiliki dampak ekonomi yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Serang. Eksistensi Kota Serang saat ini sebagai destinasi wisata religi berskala nasional merupakan potensi yang dapat terus dikembangkan di masa depan; (3) melihara dan mengembangkan potensi seni dan budaya daerah untuk

didayagunakan nilai ekonominya bagi kesejahteraan masyarakat, baik melalui peningkatan ekonomi kreatif maupun pengembangan potensi pariwisata sejarah, seni budaya, dan religi yang telah mulai tumbuh saat ini.

3.2.2 MISI

1. Memperkuat peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan.
2. Meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdayasaing.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Oleh karenanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang berkewajiban untuk menjalankan komitmen Walikota terpilih yang mengacu pada Visi Kota Serang

"TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA" :

Pada MISI KESATU (1) yaitu : MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN Serta

MISI KETIGA (3) yaitu : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING

Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang dalam operasionalnya akan selalu mengacu kepada rencana strategis dengan mengarahkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada, baik sumber daya manusia maupun pendukung lainnya yang tentunya memperhatikan akan kekuatan dan kelemahan yang akan dimuat dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang Tahun berjalan.

Sebagai pelaksana Pemerintah Daerah Kota Serang di bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menjalankan kegiatan dan programnya akan selalu berlandaskan kepada Misi Kota Serang sebagai arah dan tuntunan untuk mencapai tujuan Kota Serang sebagai penjabaran Visi Kepala Daerah yang terpilih. Namun dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh DP3AKB Kota Serang dalam pencapaian Visi dan Misi Walikota tersebut ditemukan faktor penghambat dan faktor pendorong yang dirumuskan sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Fator Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan DP3AKB Terhadap
Pencapaian Visi, Misi, Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun
2018-2023

Visi : TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA” :				
No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018-2023	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Misi 1 : Menguatkan Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan			
	Program Perlindungan Perempuan	Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan	Dukungan struktural terhadap perlindungan perempuan dan Anak
	Program Pemenuhan Hak anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ramah anak, serta masih tinggi kasus kekerasan terhadap anak	Dukungan struktural terhadap perlindungan perempuan dan Anak
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Belum optimalnya pengendalian pertumbuhan penduduk	Masih kurangnya sinergitas dalam pengendalian pertumbuhan penduduk.	Dukungan masyarakat terhadap program keluarga berencana
	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera	Masih rendahnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Belum Optimalnya layanan keluarga berencana terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Dukungan ilmu pengetahuan dan lembaga keswadayaan masyarakat sebagai mitra strategis terhadap kemajuan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga
2	MISI 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing			

	Program : Pengarusutamaan gender	Belum optimalnya pemberdayaan perempuan	Kapasitas dan Kapabilitas kelembagaan DP3AKB dalam melihat tuntutan Pemberdayaan perempuan dan masyarakat masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya pemberdayaan perempuan
--	---	---	--	---

3.3 **TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN DAN PROVINSI BANTEN DALAM URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA KELUARGA BERENCANA**

Dalam penyusunan suatu rencana pembangunan tentu dibutuhkan sinkronisasi di berbagai aspek, misalnya aspek waktu, aspek kesesuaian dengan Program Vertikal maupun Horizontal serta kesesuaian dengan kaidah lainnya.

Berikut urusan dalam Kementerian :

A. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Serang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :

VISI : "TERWUJUDNYA PEREMPUAN DAN ANAK INDONESIA YANG BERKUALITAS, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN"

Adapun Misi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Visi Kabinet Kerja terkait dengan upaya mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) pilar MISI yang tercermin pada tugas dan tanggungjawab Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

1. Pemberdayaan Perempuan
2. Perlindungan Perempuan dan Anak
3. Pemenuhan Hak Anak

Visi ini mencerminkan kebulatan tekad dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab dalam penanganan masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Kementerian Desa

Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Serang mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Desa, yaitu :

VISI : "TERWUJUDNYA DAERAH TERTINGGAL SEBAGAI DAERAH YANG MAJU DAN SETARAF DENGAN DAERAH LAIN DI INDONESIA"

Adapun Misi Kementerian Desa Berdasarkan Visi Kabinet Kerja terkait dengan upaya mengembangkan perekonomian lokal melalui pemanfaatan sumber daya lokal (sumber daya manusia, dan kelembagaan) melalui partisipasi semua pemangku kepentingan (stakeholders), yaitu:

1. Memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses modal usaha, teknologi, pasar, informasi;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat;
3. Mempercepat rehabilitasi dan pemulihan daerah-daerah pasca bencana alam dan pasca konflik serta mitigasi bencana

Misi ini mencerminkan kebulatan tekad dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab dalam penanganan masalah Pemberdayaan Masyarakat Desa.

C. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Rencana Strategis kependudukan dan keluarga berencana Kota Serang mengacu kepada Visi dan Misi BKKBN, yaitu :

VISI : "MENJADI LEMBAGA YANG HANDAL DAN DIPERCAYA DALAM MEWUJUDKAN PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG DAN KELUARGA BERKUALITAS"

Adapun Misi BKKBN Berdasarkan Visi Kabinet Kerja terkait dengan upaya mengendalikan kependudukan melalui program keluarga berencana, yaitu :

1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan.
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

Misi ini mencerminkan kebulatan tekad dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab dalam penanganan masalah pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana.

D. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Propinsi Banten

Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Propinsi Banten melalui perumusan Visi dan Misi yang sejalan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Desa dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yaitu :

VISI "BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH"

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas P3AKB Provinsi Banten Mendukung pada 3 (Tiga) Misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten, yaitu :

1. Misi Ke 1: Menciptakan Tata kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance)
2. Misi Ke 3: Meningkatkan Akses dan Pemerintah Pelayanan Pendidikan Berkualitas
3. Misi Ke 4: Meningkatkan Akses dan Pamerataan Pelayanan Kesehatan

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Banten yang diturunkan kepada Dinas P3AKB Provinsi Banten kedalam Tujuan dan Sasaran perangkat Daerah telampir Tabel , disampaikan sebagai telaah rujukan bagi DP3AKB Kota Serang dalam mensikronisasikan capaian kinerja..

3.4 TELAHAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana telah diatur terinci dalam program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang disesuaikan Implementasi Tugas pokok dan fungsi yang telah diatur terinci dalam program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kebijakan struktur organisasi dan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Serang tahun 2019-2023.

Sedangkan dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 disebutkan bahwa KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program yang terdapat dalam DP3AKB.

Berikut rujukan kebijakan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Serang, yang menjadi salah satu pedoman DP3AKB Kota Serang Terkait dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

TABEL 3.3
Capaian Persentase Anggaran dan Isu Strategis DP3AKB Kota Serang

Perangkat Daerah	Persentase Anggaran untuk TPB	Isu Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	34,12%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya 2. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan 3. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional 4. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut 2. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun 3. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimana pun

TABEL 3.4
Alternatif Skenario dan Rekomendasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TUJUAN	ISU STRATEGIS	ALTERNATIF SKENARIO	REKOMENDASI
Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	Meningkatkan cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk penduduk berpendapatan terbawah	1. Penyuluhan penggunaan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi pada masyarakat.
Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	Meningkatkan angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penyediaan 2. pelayanan KB dan alat kontrasepsi khususnya bagi keluarga miskin dan rentan. 3. Pelayanan konseling KB. 4. Meningkatkan sosialisasi program keluarga berencana. 5. Program pelayanan kontrasepsi masyarakat. 6. Meningkatkan layanan kesehatan reproduksi secara berkelanjutan
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan. 2. Meningkatkan persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan. Kegiatan penyusunan. 2. sistem perlindungan perempuan. 3. Kegiatan sosialisasi dan advokasi perlindungan tenaga kerja perempuan 4. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. 5. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 6. Mencegah dan penindakan semua hal terkait diskriminasi gender.

	2. Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) 2. Menurunkan ASFR 15-19 tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pengetahuan tentang pernikahan pada masyarakat. 2. Penyuluhan bahaya sunat perempuan. Penyuluhan dan sosialisasi usia pernikahan ideal pada masyarakat. 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sosial dan konseling tentang pernikahan dan kesehatan reproduksi.
	3. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan merumuskan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang il pengetahuan dan teknologi. 2. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik. 3. Melaksanakan sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 4. Meningkatkan partisipasi perempuan untuk memimpin dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan
	4. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan unmeet need kebutuhan ber-KB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin. 2. Program keluargaberencana. 3. Program pelayanan kontrasepsi. 4. Meningkatkan layanan kesehatan reproduksi.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penentuan isu strategis ini DP3AKB Kota Serang melihat dari berbagai sisi baik di internal ataupun eksternal dimana isu-isu ini digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan DP3AKB Kota Serang lebih baik. Sisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan isu strategis adalah :

1. Isu Strategis RPJPD 2008-2025, pada isu strategis ke-dua tentang Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat dengan Permasalahan pokok : Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga dan Pengendalian kependudukan
2. Isu Strategis RPJMD Propinsi Banten, pada Isu strategis Kesenjangan wilayah dan daya saing daerah (Sumber daya alam dan sumber daya manusia)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dimasa datang. Identifikasi isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dilakukan dengan menggunakan metode diskusi dan FGD. Adapun daftar isu strategis yang dihasilkan dari diskusi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesetaraan gender dalam pembangunan
2. Masih kurangnya kualitas perlindungan hak perempuan
3. Belum optimalnya kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak dalam perlindungan khusus.
4. Belum optimalnya capaian indikator keluarga berkualitas

Penentuan isu strategis merupakan hasil identifikasi masalah yang dihadapi dalam Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana. Dengan menganalisa Daftar Permasalahan, Isu Strategis RPJPD 2008-2025 dan Isu Strategis RPJMD Propinsi Banten serta faktor Penghambat dan Pendorong Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, maka dapat dirumuskan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.5
Aspek Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	ASPEK TERKAIT
1	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	Inventarisasi Potensi Perempuan
		Keberdayaan Perempuan
		Partisipasi dalam Pembangunan
2	Memastikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Pemenuhan Sarana Prasarana Publik
		Pembinaan Dunia usaha dan Masyarakat
		Pemenuhan Hak Anak
		Advokasi Perlindungan Perempuan
3	Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi	Data Mikro Keluarga
		Pemenuhan Tenaga Penggerak Keluarga Berencana
		Promosi KIE
4	Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Implementasi Layanan KB
		Pembinaan Kesertaan KB
		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Isu strategis digolongkan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk menjadikan DP3AKB Kota Serang lebih baik. Untuk itu diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan masyarakat melalui pembinaan dan pengembangan kualitas hidup perempuan dan mencari solusi terhadap problematikanya, menggali dan inventarisasi potensi perempuan serta membentuk partisipasi perempuan dan masyarakat dalam pembangunan di kota serang.
- b. Memastikan perlindungan perempuan dan anak melalui pemenuhan sarana prasarana, pembinaan dunia usaha dan masyarakat serta membangun kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak di kota serang.
- c. Mengendalikan Penduduk, Advokasi Penggerakan Dan Informasi melalui Advokasi Dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Penggerakan Dan Pendayagunaan Penyuluh KB (PIKB) Dan Kader KB serta Pengembangan Data dan Informasi Keluarga di kota serang.
- d. Melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga melalui Jaminan Pelayanan KB, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di kota serang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Pernyataan atau arti kata tujuan sesungguhnya merupakan suatu keterangan yang memperjelas ataupun mengarahkan dalam rumusan yang telah ditetapkan. Isi dari tujuan harus dapat memprediksi atau memperkirakan kondisi atau capaian yang akan datang untuk dicapai. Pernyataan tujuan harus sederhana, spesifik, memiliki sasaran dan mencakup isu-isu utama di dalam tubuh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang saat ini.

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota No.117 Tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Wajib non pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pelayanan Program Keluarga Berencana. DP3AKB dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi serta Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi serta Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi serta Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi serta Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Pengelolaan UPT; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Sasaran merupakan bagian utama dari tujuan yang lebih spesifik dan terukur. Oleh sebab itu dalam menentukan sasaran seyogyanya harus dapat menerangkan apa yang ada di kata tujuan dan mengoperasionalkannya pada sesuatu yang terukur. Pernyataan sasaran harus sederhana dan mencakup sub issue sehingga setiap aspek utama pada tujuan dapat tercapai.

Merujuk pada kerangka pemahaman Rencana pembangunan jangka panjang Nasional (RPJPN 2005–2025), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 serta mengakselerasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) serta mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, kearifan lokal dan nilai peradaban dalam implementasinya, maka perlu diwujudkan suatu kondisi masyarakat yang dinamis, masyarakat yang maju dan berdaya saing yang dirumuskan kedalam Tujuan dan Sasaran Daerah yang menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan.

Untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Serang 2019-2023, maka perlu diperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Serang 2018-2023 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ada pada **misi ke-1** yaitu “Memperkuat Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan” .

Misi ke-1 ini memiliki penjabaran sebagai berikut :

Tujuan daerah :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berbudaya

Indikator tujuan daerah : Indek Pembangunan Manusia

Sasaran Daerah :

- a. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Indikator sasaran daerah :

- a. Rata-Rata Lama Sekolah
- b. Harapan Lama Sekolah
- c. Usia Harapan Hidup

Tujuan Renstra_:

- a. Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang berkualitas
- b. Terwujudnya Keluarga Sejahtera

Indikator Tujuan :

- a. Indeks KLA dan APE
- b. i-Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)

Sasaran Renstra_:

- a. Pelayanan yang terintegrasi pada perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak
- b. Peningkatan pemberdayaan perempuan
- c. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk melalui KB
- d. Meningkatnya pemberdayaan keluarga sejahtera melalui kelompok kegiatan (BKB, BKL, BKR, PIK-R, dan UPPKS)

Indikator Sasaran :

1. Rasio KDRT
2. Perentase Perlindungan Anak
3. Indeks IPG & IDG
4. Angka TFR (Total Fertility Rate)
5. Persentase Kelompok Kegiatan KB yang Aktif

Serta pada **misi ke-3** yaitu "Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing".

Misi ke-3 ini memiliki penjabaran sebagai berikut :

Tujuan daerah :

Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan inklusif berbasis potensial keunggulan lokal daerah

Indikator tujuan daerah : Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran Daerah :

Meningkatnya perekonomian daerah dan daya beli masyarakat

Indikator sasaran daerah : Angka Kemiskinan

Tujuan Renstra : Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Tujuan : Persentase Kampung Tematik/KRLA

Sasaran Renstra : Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat

Indikator Sasaran : Persentase Kelompok Masyarakat yang Berprestasi

Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kinerja Tahun Dasar	Capaian Kinerja				Target Kinerja		Kondisi Akhir Target Kinerja Tujuan/Sasaran Renstra (2023)	
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah
						1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel		Indeks Evaluasi RB	Poin	NA	NA	67.31	67.30	68.50	69.00	69.00	69.00	
		Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan lingkup pemerintah daerah	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)	Poin	-	66.79	65.62	64.89	67.00	67.50	67.50	67.50	
2	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang berkualitas		Indeks KLA	Skor/ Kategori	Pratama	Pratama	500	520	601	610	Madya	Madya	
			Indeks APE	Skor/ Kategori	Paratama	Paratama	750	790	800	900	Madya	Utama	
		Pelayanan yang terintegrasi pada perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Rasio KDRT	Rasio	0.98	0.056	0.0047	0.0044	0.0045	0.0044	0.0044	0.0044	
			Persentase Perlindungan anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Peningkatan pemberdayaan perempuan	Indeks IPG	Poin	91.16	91.96	92.28	92.47	92.60	93	93	93	
			Indeks IDG	Poin	62.65	62.10	61.26	61.66	62.91	63.2	63.2	63.2	
3	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat		Persentase kampuk tematik / KRLA	Persen	-	-	50	75	100	100	100	100	

		Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat yang Berprestasi	Persen	0	0	26.86	44.77	100	100	100	100
4	Meningkatnya pembangunan keluarga		Indeks iBangga	Poin	NA	NA	NA	53.52	57	58	58	58
		Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui KB	Angka Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.47	2.34	2.37	1.5	2.32	2.31	2.31	2.31
		Meningkatnya pemberdayaan keluarga sejahtera	Capaian keluarga aktif dalam kelompok kegiatan KB	Persen	62	72	75	76	78	80	80	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan derivasi dari tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Strategi memuat rumusan tindak yang lebih taktis dan pragmatis dalam menerjemahkan sasaran dalam RPJMD. Sementara arah kebijakan memuat panduan tindak yang lebih konkret yang pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Arah kebijakan juga merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Perencanaan ataupun proses perencanaan yang telah disusun tentunya harus memiliki strategi sebagai aplikasi langsung di lapangan. Strategi ini kemudian diperkuat dengan kebijakan yang diambil oleh organisasi tersebut sebagai langkah penguatan terhadap Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan. Penetapan strategi maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang akan mempertimbangkan keadaan baik Internal ataupun Eksternal.

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dengan demikian tujuan dan sasaran daerah harus menunjukkan relevansi dan konsistensi dengan pernyataan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota RPJMD periode berkenaan, termasuk tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut. Tabel 5.1 berikut ini menunjukkan keterhubungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan:

Tabel 5.1
Tujuan , Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Visi	TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA						
Misi 1	MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2019	2021	2020	2022	2023
Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang berkualitas	Pelayanan yang terintegrasi pada perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Optimalisasi perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Mempersiapkan data dan rencana Pemenuhan hak perempuan dan anak melalui Kepastian Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Menguatkan Proses pemenuhan hak perempuan dan anak melalui Kepastian Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Mengoptimalkan pemenuhan hak perempuan dan anak melalui Kepastian Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Pencapaian kinerja pemenuhan hak perempuan dan anak melalui Kepastian Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Pencapaian kinerja pemenuhan hak perempuan dan anak melalui Kepastian Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Optimalisasi pemberdayaan perempuan	Mempersiapkan data dan rencana Keberhasilan Perempuan melalui Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Menguatkan proses Keberhasilan Perempuan melalui Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Mengoptimalkan Keberhasilan Perempuan melalui Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Pencapaian kinerja Keberhasilan Perempuan melalui Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Pencapaian kinerja Keberhasilan Perempuan melalui Peningkatan Pemberdayaan Perempuan

Terwujudnya Keluarga Sejahtera	Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui KB	Optimalisasi pengendalian pertumbuhan penduduk	Mempersiapkan data dan rencana Kelahiran Rata-Rata melalui Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi	Menguatkan proses Kelahiran Rata-Rata melalui Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi	Mengoptimalkan Kelahiran Rata-Rata melalui Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi	Pencapaian kinerja Kelahiran Rata-Rata melalui Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi	Pencapaian kinerja Kelahiran Rata-Rata melalui Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi
	Meningkatnya pemberdayaan keluarga sejahtera	Optimalisasi pelayanan keluarga berencana dan peningkatan ketahanan kesejahteraan keluarga	Mempersiapkan data dan rencana Pembentukan peserta KB aktif pada PUS dan Keluarga melalui Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Menguatkan proses Pembentukan peserta KB aktif pada PUS dan Keluarga melalui Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Mengoptimalkan Pembentukan peserta KB aktif pada PUS dan Keluarga melalui Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Pencapaian kinerja peserta KB aktif pada PUS dan Keluarga melalui Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	Pencapaian kinerja peserta KB aktif pada PUS dan Keluarga melalui Pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

Misi 3	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat	Peningkatan perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga pemberdayaan masyarakat untuk mencapai Kualitas Hidup	Mempersiapkan data dan rencana Keberhasilan masyarakat melalui Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Menguatkan proses Keberhasilan Masyarakat melalui Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Mengoptimalkan Keberhasilan Masyarakat melalui Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Pencapaian kinerja Keberhasilan Masyarakat melalui Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Pencapaian kinerja Keberhasilan Masyarakat melalui Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Setelah tujuan dan arah kebijakan di tetapkan, langkah selanjutnya adalah menata program dan kegiatan, yang di artikan sebagai cara untuk mencapai tujuan, dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan, karena dalam program telah memuat aspek yang harus dijalankan agar tujuan program dapat tercapai.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan melalui regulasi UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 16, dan PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 13.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya (berupa personal), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumberdaya (permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Kota Serang 2019-2023.

Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa indikator kinerja program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Sedangkan indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai, suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Berikut ini penjelasan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Indikator Program tersebut ; **Persentase Organisasi perempuan terbina dalam pemberdayaan perempuan** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peningkatan kualitas Organisasi Perempuan

2. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Indikator Program tersebut ; **Capaian Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sosialisasi dan Pencanaan Gerakan Sayang Ibu
 - 2) Pengatan dan Pelembagaan Kelurahan Sayang Ibu

3. Program Perlindungan Perempuan
Indikator Program tersebut; **Cakupan Penanganan Kekerasan perempuan dan anak** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pemenuhan Hak Perempuan
 - 2) Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO

4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Indikator Program tersebut; **Persentase pemenuhan hak anak** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pemenuhan Hak Anak
 - 2) Pembinaan Forum Anak
 - 3) Pemilihan Duta Anak
 - 4) Pelembagaan KLA

5. Program Perlindungan Khusus Anak
Indikator Program tersebut; **Cakupan Pelayanan Perlindungan Hak anak** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak

6. Program Pemberdayaan Masyarakat
Indikator Program tersebut ; **Capaian LPM Kategori Aktif** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

7. Program Pengendalian Penduduk
Indikator Program tersebut; **Capaian Data Keluarga Yang Akurat** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan data dan Informasi Keluarga
 - 2) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan
 - 3) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

- 4) Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
 - 5) Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana
- Indikator Program (1) tersebut; **Cakupan Promosi KIE-KB** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- 1) Advokasi dan peningkatan KIE-KB
- Indikator Program (2) tersebut; **Capaian pemenuhan dan penggerakan PLKB dan Kader KB** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penguatan kelembagaan PLKB dan Kader KB
- Indikator Program (3) tersebut; **Capaian PPM peserta KB** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengendalian dan pendistribusian Alkon
 - 2) Pelaksanaan Pelayanan KB
 - 3) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - 4) Dukungan operasional Pelayanan KB bergerak
 - 5) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - 6) Pelaksanaan Pengelolaan Proram KKBPK di Kampung KB
 - 7) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan kesertaan ber-KB
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- Indikator Program (1) tersebut; **Capaian PPM peserta KB** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan KB
 - 2) Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana
 - 3) Operasionalisasi Balai Penyuluhan KB
- Indikator Program (2) tersebut; **Capaian Kelompok Kegiatan KB aktif** dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pembinaan Kelompok Kegiatan Keluarga Berencana
10. Program Tata Kelola Pemerintahan
- Indikator Program pada bidang ; **Kesekretariatan**
- 1) Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariatan
 - 2) Persentase Sarana Dan Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik
 - 3) Tingkat ketersediaan Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 4) Tingkat Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan
 - 5) Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Pengelolaan Dan Pelaporan Keuangan

6) Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja

➤ Kegiatan pada Kepala seksi : **Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
- c. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
- d. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah
- e. Penyusunan Data dan Profil Perangkat Daerah

➤ Kegiatan pada Kepala seksi : **Penatausahaan Umum dan Kepegawaian**

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
- c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- d. Peningkatan Kapasitas Aparatur
- e. Penyediaan dokumentasi, informasi dan komunikasi OPD
- f. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- g. Penyediaan makanan dan minuman
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

➤ Kegiatan pada Kepala seksi : **Penatausahaan Keuangan**

- a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Selanjutnya terlampir Matrik yang berisikan Tujuan, Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan indikatif anggaran, pada tabel 6.1, table 6.2, table 6.3, table 6.4.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
				KEGIATAN	2019				2020		2021		2022		2023		Kinerja	Rp			
					Kinerja				Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja			Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA									18,068,729,720		10,948,882,466		13,953,545,705		21,301,961,000		15,905,531,195		15,905,531,195		
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			2	08					7,945,589,728		5,937,584,925		7,621,234,964		11,289,610,000		9,504,893,500		9,504,893,500		
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel																				
		Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan lingkup pemerintah daerah																			
			2	08	01																
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA															
						Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Poin	100	100	6,251,836,053	100	5,089,842,075	100	6,371,088,274	100	7,276,095,000	100	6,580,103,500	100	6,580,103,500	
			2	08	01	2.01															
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	258,993,600	100	164,776,400	100	185,150,000	100	282,115,750	100	203,679,000	100	203,679,000	
			2	08	01	2.02															
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	4,843,298,644	100	4,034,296,266	100	4,959,035,936	100	5,436,955,000	100	5,026,232,962	100	5,026,232,962	
			2	08	01	2.03															
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	47,000,000	1	39,990,000	1	31,200,000	1	40,560,000	1	34,000,000	1	34,000,000	
			2	08	01	2.05															
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen								100	51,755,000	100	15,000,000	100	15,000,000	

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
				KEGIATAN	2019				2020		2021		2022		2023		Kinerja	Rp			
					2018				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum PD	Persen	100	100	406,533,740		311,550,859	100	238,412,272	100	337,282,150	100	332,221,538	100	332,221,538		
			2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		100	152,450,000			100	145,005,561	100	157,521,000	100	147,000,000	100	147,000,000		
			2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		100	346,560,069	100	340,878,550	100	418,740,000	100	513,430,600	100	406,970,000	100	406,970,000		
			2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		100	197,000,000	100	198,350,000	100	393,544,505	100	456,475,500	100	415,000,000	100	415,000,000		
	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang berkualitas				Indeks KLA	Skor/Kategori	Pratama	Pratama		500		520		601 (Madya)		610 (Madya)		610 (Madya)			
						Indeks APE	Skor/Kategori	Pratama	Pratama		750		790		800		900		900		
		Pelayanan yang terintegrasi pada perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak			Rasio KDRT	Rasio	0,98	0,056		0,005		0,0046		0,005		0,004		0,0044			
					Persentase Perlindungan anak	Persen	100	100		100		100		100		100		100		100	
		Peningkatan pemberdayaan perempuan			Indeks IPG	Poin	91,16	91,16		92,28		92,47		92,60		93		93			
					Indeks IDG	Poin	62,65	62,1		61,26		61,66		62,91		63,2		63,2			
			2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi perempuan terbina dalam pemberdayaan perempuan	Persen	10	15	695,686,700	20	288,281,800	30	306,763,089	40	1,525,000,000	45	1,045,000,000	45	1,045,000,000		
					Cakupan Data Terpilah Gender dan anak	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
			2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah	Persen		50	350,908,825			0		50	500,000,000	65	300,000,000	65	300,000,000		
			2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pemberdayaan perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persen						0		20	525,000,000	22	370,000,000	22	370,000,000		

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK				PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
							KEGIATAN				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja		Rp	
											2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja				Rp
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persen			344,777,875		288,281,800	30	306,763,089	40	500,000,000	45	375,000,000	45	375,000,000		
			2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Persen	75	100	235,138,939	100	156,196,776	100	222,930,000	100	672,340,000	100	527,250,000	100	527,250,000		
			2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Persen		100	117,569,471	100	78,098,389	100	55,090,000	100	405,090,000	100	320,000,000	100	320,000,000		
			2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	Persen		95	117,569,468	98	78,098,387	100	167,840,000	100	267,250,000	100	207,250,000	100	207,250,000		
			2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Capaian peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dari hak anak	Persen	100	100	117,569,468	100	78,098,387	100	105,339,500.00	100	150,000,000	100	176,000,000	100	176,000,000		
			2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Persen								50	150,000,000	65	120,000,000	65	120,000,000		
			2	08	04	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Persen		90	117,569,468	95	78,098,387	97	105,339,500	98		100	56,000,000	100	56,000,000		
			2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Terpisah Gender dan Anak	Persen	100	100	178,996,500	100	103,405,000	100	103,450,000								
			2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian ketersediaan data terpisah sistem informasi gender dan anak	Persen		100	178,996,500	100	103,405,000	100	103,450,000								

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
				KEGIATAN				2019		2020		2021		2022		2023		Kinerja		Rp
								2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	Persen		100	348,792,600	100	143,662,500	100	146,699,601	100	305,000,000	100	171,540,000	100	171,540,000	
			2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha/Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian hak-hak anak di kota serang	Persen		80	348,792,600	83	143,662,500	84	146,699,601	85	305,000,000	90	171,540,000	90	171,540,000	
			2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pelayanan Perlindungan Hak Anak	Persen	75	100	117,569,468	100	78,098,387	100	364,964,500	100	1,361,175,000	100	1,005,000,000	100	1,005,000,000	
			2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak	Persen						0		90	200,000,000	95	165,000,000	95	165,000,000	
			2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	Persen						100	303,015,000	100	461,175,000	100	410,000,000	100	410,000,000	
			2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak	Persen			117,569,468		78,098,387	66	61,949,500	75	700,000,000	80	430,000,000	80	430,000,000	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			2 13						5,452,817,500		1,434,380,000		1,383,617,192		3,900,000,000		3,358,220,775		3,358,220,775	
	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat				Persentase kumpuk tematik /KRLA	Persen		0		50		75		100		100		100		
	Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat				Persentase Kelompok Masyarakat yang Berprestasi	Persen		0		26.86		44.77		100		100		100		
			2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Capaian LPM Kategori Aktif	Persen	100	100	5,452,817,500	100	1,434,380,000	100	1,383,617,192	100	3,900,000,000	100	3,358,220,775	100	3,358,220,775	
			2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat	Persen		95	5,452,817,500	100	1,434,380,000	100	1,383,617,192	100	3,900,000,000	100	3,358,220,775	100	3,358,220,775	

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK				PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR RENSTRA		UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
							KEGIATAN				2019		2020		2021		2022		2023				
											2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja			
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2	14	03	2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Capaian PPM peserta KB	Persen			1,341,619,242		1,555,482,730	68.00	2,161,472,560	69	1,811,645,840	75	1,175,438,420	75	1,175,438,420	
			2	14	03	2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemberdayaan dan peningkatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Persen			523,630,000		591,855,000	68.00	492,344,000	69	492,344,000	77	292,344,000	77	292,344,000	
			2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Capaian Kelompok Kegiatan KB aktif	Persen	62	72	336,989,000	75	286,480,000	76	1,042,476,000	78	1,147,229,160	80	244,068,500	80	244,068,500	
			2	14	04	2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan yang aktif	Persen		72	336,989,000	75	286,480,000	76	1,042,476,000	78	1,147,229,160	80	244,068,500	80	244,068,500	

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah (sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 dan/atau Nomor 050-5889)

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
				KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH		
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA									18,068,729,720		10,937,382,466		13,953,545,705		21,301,961,000		15,905,531,195		44,180,817,175		80,251,432,086		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.08						7,945,589,728		5,926,084,925		7,621,234,964		11,289,610,000		9,504,893,500		6,752,216,626		42,295,245,117		
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel																						
		Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan lingkup pemerintah daerah																					
			2.08.01			POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Poin	NA	100	100	6,251,836,053	100	5,078,342,075	100	6,371,088,274	100	7,276,095,000	100	6,580,103,500	100	100	31,565,296,902	
			2.08.01.2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	258,993,600	100	164,776,400	100	185,150,000	100	282,115,750	100	303,057,995	100	100	1,194,093,745		
			2.08.01.2.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	108,710,000	4	47,298,400	4	124,538,000	5	180,500,000			22	686,591,395	17	461,046,400	
			2.08.01.2.01.01			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen										5	225,544,995			5	225,544,995	
			2.08.01.2.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	1	10,574,400	1	12,076,500	1	22,600,000	1	32,487,500			5	98,463,400	4	77,738,400	
			2.08.01.2.01.02			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen										1	20,725,000			1	20,725,000	
			2.08.01.2.01.03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	10,574,400	1	5,536,500	1	4,875,000	1	10,500,000			4	36,975,900	5	31,485,900	
			2.08.01.2.01.03			Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen																
			2.08.01.2.01.03			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen										1	5,490,000			1	5,490,000	
			2.08.01.2.01.04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	10,574,400	1	12,571,500	1	6,000,000	1	15,625,000			4	50,859,900	5	44,770,900	
			2.08.01.2.01.04			Jumlah dokumen DPA-SKPD	Dokumen																
			2.08.01.2.01.04			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen										1	6,089,000			1	6,089,000	

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK			PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
						KEGIATAN				2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH			
										2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
										8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	10,574,400	1	5,536,500	1	5,987,000	1	12,600,000			4	40,786,900	5	34,697,900	
			2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen									1	6,089,000			1	6,089,000		
			2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	107,986,000	2	81,757,000	2	21,150,000	2	30,403,250			11	280,416,250	8	241,296,250	
			2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan									3	39,120,000			3	39,120,000		
			2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	4,843,298,644	100	4,034,296,266	100	4,959,035,936	100	5,436,955,000	100	4,906,891,813	100			24,180,477,659	
			2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	4,823,638,644	12	4,020,721,266	12	4,880,432,936	12	5,308,670,000			85	23,850,184,659	48	19,033,462,846	
			2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan										37	4,816,721,813			37	4,816,721,813	
			2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	1	9,660,000	1	6,540,000	1	48,555,000	1	40,365,000			5	124,780,000	5	105,120,000	
			2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan									1	19,660,000			1	19,660,000		
			2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen		2	10,000,000	2	7,035,000	2	30,048,000	4	87,920,000			14	205,513,000	10	135,003,000	
			2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan									4	70,510,000			10	70,510,000		
			2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	47,000,000	100	39,990,000	100	31,200,000	100	40,560,000	100	33,600,000	100		100	192,350,000	
			2	08	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1	1	47,000,000	1	39,990,000	1	31,200,000	1	40,560,000			5	192,350,000	4	158,750,000	
			2	08	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan									1	33,600,000			1	33,600,000		
			2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen			-	-		0	100	51,755,000	100	6,000,000	100		100	57,755,000		
			2	08	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Orang	0	0	-	0	-	0	35	51,755,000			40	57,755,000	35	51,755,000		
			2	08	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit									5	6,000,000			5	6,000,000		
			2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	406,533,740		300,050,859	100	238,412,272	100	337,282,150	100	269,118,107	100		100	1,559,229,128	
			2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	15,000,000	12	22,000,000	12	6,204,488	12	15,000,000			49	64,765,999	48	66,036,488	
			2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket									1	6,561,511			1	6,561,511		

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
				KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH			
									2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22
			2 08 01 2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	64,000,000	12	39,000,000	12	45,528,488	12	91,000,000	49	316,616,027	48	239,528,488				
			2 08 01 2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan kebutuhan peralatan rumah tangga	Bulan	12	12	18,800,000	12	17,560,000	12	15,584,262	12	23,065,900	49	85,075,254	48	75,010,162				
			2 08 01 2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman rapat dan harian pegawai	Bulan	12	12	35,000,000	12	34,245,159	12	30,480,000	12	39,312,000	49	172,017,159	48	139,037,159				
			2 08 01 2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Bulan	12	12	34,950,000	12	18,800,000	12	29,671,050	12	56,374,250	49	166,279,265	48	139,795,300				
			2 08 01 2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan	Bulan	12	12	14,000,000	12	15,000,000	12	9,048,984	12	11,325,000	49	60,373,984	48	49,373,984				
			2 08 01 2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	Bulan	12	12	224,783,740	12	153,445,700	12	101,895,000	12	101,205,000	49	686,269,440	48	581,329,440				
			2 08 01 2.07	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	152,450,000	-	-	100	145,005,561	100	157,521,000	100	177,750,000	100	632,726,561	100	632,726,561			
			2 08 01 2.07	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor (AC split)	Unit	2			0		2					6	6					
						Komputer PC	Unit	3			0		1					7	7					
						Laptop	Unit	13	152,450,000	0		2	145,005,561	3	157,521,000			18	18	632,726,561	454,976,561			
						Meja Kerja	Unit	0		0		2		2				4	4					
						Printer	Unit	5		0		3		3				11	11					
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit									25	177,750,000		25	177,750,000				
			2 08 01 2.08	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	346,560,069	100	340,878,550	100	418,740,000	100	513,430,600	100	403,351,600	100	2,022,960,819	100	2,022,960,819			
			2 08 01 2.08	2.08	Penyediaan Jasa Surat Meyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat dan jumlah materai	Bulan	12	12	25,000,000	12	24,000,000	12	8,800,000	12	13,002,600	49	77,302,600	48	70,802,600				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan									1	6,500,000		1	6,500,000				
			2 08 01 2.08	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan kebutuhan telepon, internet dan listrik	Bulan	12	12	95,793,809	12	56,000,000	12	147,000,000	12	152,100,000	49	573,893,809	48	450,893,809				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan									12	123,000,000		12	123,000,000				
			2 08 01 2.08	2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0	0	-	0	-	0	12	23,848,000	49	45,708,000	12	23,848,000					
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan									1	21,860,000		1	21,860,000				
			2 08 01 2.08	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	12	225,766,260	12	260,878,550	12	262,940,000	12	324,480,000	49	1,326,056,410	48	1,074,064,810				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan									12	251,991,600		12	251,991,600				
			2 08 01 2.09	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	197,000,000	100	198,350,000	100	393,544,505	100	456,475,500	100	480,333,985	100	1,725,703,990	100	1,725,703,990			
			2 08 01 2.09	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan	Unit		107,000,000		115,000,000	38	365,382,505	38	443,475,500			104	1,461,103,990	76	1,030,858,005			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit									28	430,245,985		28	430,245,985				

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK				PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB			
											KEGIATAN		2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH		
											SUB KEGIATAN		2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	Kinerja
							1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
			2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor	Bulan	12	12	35,000,000	12	31,000,000	12	19,090,000	12	0	54	88,090,000	48	85,090,000				
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit									6	3,000,000			6	3,000,000				
			2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor	Gedung	1	1	55,000,000	1	52,350,000	1	9,072,000	1	13,000,000		6	176,510,000	4	129,422,000			
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit										2	47,088,000			2	47,088,000			
	Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang berkualitas							Indeks KLA	Skor/ Kategori	Pratama	Pratama		500		520		601 (Madya)		610 (Madya)	Madya		Madya					
								Indeks APE	Skor/ Kategori	Pratama	Pratama		750		790		800		900	Madya		Utama					
		Pelayanan yang terintegrasi pada perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak						Rasio KDRT	Rasio	0,98	0,56		0,0047		0,0044		0,0045		0,0044	0,0044		0,0044					
								Persentase Perlindungan anak	Persen	100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00					
		Peningkatan pemberdayaan perempuan						Indeks IPG	Poin	91,16	91,96		92,28		92,47		92,60		93,00	93,00		93,00					
								Indeks IDG	Poin	62,65	62,10		61,26		61,66		62,91		63,20	63,20		63,20					
			2	08	02			PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi perempuan terbina dalam pemberdayaan perempuan	Persen	10	15	695,686,700	20	288,281,800	30	306,763,089	40	1,525,000,000	45	1,045,000,000	95	45	3,860,731,589			
								Cakupan Data Terpilah Gender dan anak	Persen	100	100		100		100		100		100	90		100					
			2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah	Persen		50	350,908,825	-	0	0	50	500,000,000	65	300,000,000			65	1,150,908,825			
			2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Workshop kegiatan Gender analysis Pathway (GAP) dan Gender Budger Statement (GBS)	Persen						0	0	100	100,000,000		100	150,000,000	100	100,000,000			
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen										1	50,000,000			1	50,000,000			

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
				KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH				
									2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data terpilah gender dan anak	Dokumen				0		1			1		1				
								Jumlah data IPG dan IDG	Dokumen		0		0	0	0	1	200,000,000			1	272,000,000	1	200,000,000		
								Jumlah koordinator pendata Tk. Kecamatan	Orang						6				6		6				
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen									1	72,000,000			1	72,000,000		
			2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Perda, Perwal dan SK Pengarusutamaan Gender	Dokumen				0	0	1	100,000,000			1	163,512,500	1	100,000,000		
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah									32	63,512,500			32	63,512,500		
			2	08	02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	sosialisasi tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG bagi OPD se Kota Serang	Orang	95	350,908,825	0	0	0	100	100,000,000			195	565,396,325	195	450,908,825		
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah									32	114,487,500			32	114,487,500		
			2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pemberdayaan perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persen		-	-	-	0	0	20	525,000,000	22	370,000,000	22		22	895,000,000	
			2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kelompok perempuan terbina di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Klmpk					0	0	9	350,000,000			9	650,000,000	9	350,000,000	
								Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen									1	300,000,000			1	300,000,000		
			2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Data partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Dokumen				0	0	1	175,000,000			1	245,000,000	1	175,000,000		
								Jumlah peserta bintek pelaku usaha perempuan	Orang							120			120		120				
								Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi									3	70,000,000			3	70,000,000		

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK				PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
											2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH		
							2018				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		Rp
			8	9	10	11	12				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persen		344,777,875		288,281,800	30	306,763,089	40	500,000,000	45	375,000,000	95	1,814,822,764	45	1,814,822,764		
							Jumlah peserta pembinaan kapasitas pemberdayaan perempuan DWP	Peserta		60		110		50		100				320		320			
							Jumlah peserta pembinaan kapasitas pemberdayaan perempuan GOW	Organisasi		160		330		34		34				558		558			
			2	08	02	2.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan	Orang		50	173,125,000	0	75	112,867,478	100	300,000,000			225	930,992,478	225	730,992,478		
							Jumlah peserta pelatihan Dharma Wanita Persatuan	Peserta		120		0		50		70				240		240			
							Jumlah peserta seminar Dharma Wanita Persatuan	Peserta		160		0		80		100				0		340			
							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang									564	200,000,000			564	200,000,000			
			2	08	02	2.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang di bina melalui program P2WKSS	Kelurahan		2	171,652,875	2	143,281,800	2	193,895,611	2	200,000,000			8	883,830,286	8	708,830,286	
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen									2	175,000,000			2	175,000,000			
			2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Persen	75	100	235,138,939	100	156,196,776	100	222,930,000	100	672,340,000	100	527,250,000	100	1,696,855,715	100	1,813,855,715	
			2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Persen		100	117,569,471	100	78,098,389	100	55,090,000	100	405,090,000	100	233,000,000	100	888,847,860	100	888,847,860	
			2	08	03	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan PUSPAGA						0	55,090,000	100	255,090,000			100	445,180,000	100	310,180,000		
							Jumlah peserta pencegahan dan penanganan perlindungan perempuan							0		100				100		100			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen									1	135,000,000			1	135,000,000			
			2	08	03	2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Peserta	100	117,569,471	100	78,098,389	0	0	100	150,000,000			306	443,667,860	300	345,667,860		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah									6	98,000,000			6	98,000,000			
			2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	Persen	95	117,569,468	98	78,098,387	100	167,840,000	100	267,250,000	100	177,250,000	98	808,007,855	100	808,007,855		
			2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pengaduan perempuan korban kekerasan	Layanan	100	117,569,468	100	78,098,387	20	100,590,000	30	200,000,000			300	616,257,855	250	496,257,855		
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang									50	120,000,000			50	120,000,000			

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK			PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
						KEGIATAN				2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH				
										2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		Rp	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan korban TPPO	Persen						100	67,250,000	100	67,250,000			200	191,750,000	200	134,500,000	
			2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan								30	57,250,000				30	57,250,000		
			2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Persen								100	117,000,000					117,000,000		
			2	08	03	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan														30,150,000	30,150,000	
			2	08	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang														27,350,000	27,350,000	
			2	08	03	2.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang														34,500,000	34,500,000	
			2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen														25,000,000	25,000,000	
			2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Capaian peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dari hak anak	Persen	100	100	117,569,468	100	78,098,387	100	105,339,500	100	150,000,000	100	176,000,000	100	627,007,355	100	627,007,355	
			2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Persen								50	150,000,000	65	120,000,000	65	270,000,000	65	270,000,000	
			2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Jumlah peserta sosialisasi Gerakan Sayang Ibu Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Org Org Laporan						0	180	150,000,000			180	270,000,000	180	150,000,000		
			2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Persen		90	117,569,468	95	78,098,387	97	105,339,500	98	0	100	56,000,000		357,007,355	357,007,355		
			2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan pengurus PUSPAGA Jumlah Kecamatan pengurus GSI Jumlah Kecamatan pengurus P2TP2A Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan Kecamatan Kecamatan Orang		1	117,569,468	2	78,098,387	1	105,339,500	0	0	0	4	357,007,355	3	301,007,355		
			2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang									50	56,000,000			50	56,000,000		

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
				KEGIATAN					2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH				
				SUB KEGIATAN					2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
				1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persen	100	100	178.996,500	100	103,405,000	100	103,450,000		-		-		385,851,500		385,851,500			
			2	08	05	2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persen		100	178.996,500	100	103,405,000	100	103,450,000		-		-		385,851,500		385,851,500			
			2	08	05	2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		1	100,000,000	1	65,400,000	1	53,450,000	0		0			3	218,850,000	3	218,850,000		
			2	08	05	2.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		1	78,996,500	1	38,005,000	1	50,000,000	0		0			3	167,001,500	3	167,001,500		
			2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	Persen		100	348,792,600	100	143,662,500	100	146,699,601	100	305,000,000	100	171,540,000	100	1,115,694,701	100	1,115,694,701		
			2	08	06	2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian hak-hak anak di kota serang	Persen		80	348,792,600	83	143,662,500	84	146,699,601	85	305,000,000	90	171,540,000	90	1,115,694,701	90	1,115,694,701		
			2	08	06	2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah forum anak tingkat Kota Serang dan Kelurahan yang dibentuk	Forum Anak		4			3		3		10			20		16			
			2	08	06	2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan forum anak	Orang			348,792,600		143,662,500		146,699,601		360		155,000,000		360		360		
			2	08	06	2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak pada Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Serang	Anak		150		100		100		100		100		450		300			
			2	08	06	2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemilihan Duta Anak Kota Serang	Orang		0		100		0		75		75		175		175			
			2	08	06	2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kongres Anak Nasional	Orang		0		0		0		10		10		10		10			
			2	08	06	2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi									2		96,540,000		2		96,540,000		
			2	08	06	2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rapat koordinasi Persiapan Kota Layak Anak	Orang					0		0		100		150,000,000		100		100		
			2	08	06	2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rapat persiapan verifikasi Kota Layak Anak	Orang					0		0		100		150,000,000		100		100		
			2	08	06	2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen									1		75,000,000		1		75,000,000		
			2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pelayanan Perlindungan Hak Anak	Persen	75	100	117,569,468	100	78,098,387	100	364,964,500	100	1,361,175,000	100	1,005,000,000	100	2,926,807,355	100	2,926,807,355		
			2	08	07	2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak	Persen			-		-	0		-	90	200,000,000	95	165,000,000	95	365,000,000	95	365,000,000	
			2	08	07	2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan PUSPA di Kota Serang	Forum						0		1				2		1			
			2	08	07	2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pencegahan dan penanganan perlindungan khusus anak	Keg						0		1		200,000,000		1		1	200,000,000		
			2	08	07	2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen											165,000,000		1		165,000,000		

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK	PROGRAM		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
				KEGIATAN					2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH				
				SUB KEGIATAN					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
									2018																
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			2	08	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	Persen	-	-	-	100	303,015,000	100	461,175,000	100	410,000,000	100	1,174,190,000	100	1,174,190,000			
		BOKB renja 2021						Terpenuhinya layanan pengaduan khusus anak	Kasus				30	41,840,000	25	200,000,000			105	411,840,000	55	241,840,000			
			2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang							50	170,000,000			50	170,000,000			
								Terpenuhinya penanganan kasus	Persen				75	261,175,000	75	261,175,000			180	762,350,000	150	522,350,000			
			2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan							30	240,000,000			30	240,000,000			
			2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak	Persen		117,569,468	78,098,387	66	61,949,500	75	700,000,000	80	430,000,000	80	1,387,617,355	80	1,387,617,355		
								Jumlah kelurahan pembentukan pengurus PATBM	Kelurahan		14		14		10		15		53		53				
								Jumlah PATBM terbina	Kelurahan		0		0		0		67		67		67				
			2	08	07	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta evaluasi PATBM	Orang		117,569,468	78,098,387	0	61,949,500	700,000,000			67	1,387,617,355	67	957,617,355			
								Jumlah peserta pelatihan PATBM	Orang		0		0		0		210		210		210				
								Jumlah peserta pencegahan kekerasan terhadap anak	Orang		0		0		0		150		150		150				
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen								1	430,000,000			1	430,000,000			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			2	13								5,452,817,500	1,434,380,000		1,383,617,192	3,900,000,000		3,358,220,775		15,529,035,467		15,529,035,467			
	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat							Persentase kampung tematik / KRLA	Persen	-	-		100			100		100		100					
	Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat							Persentase Kelompok Masyarakat yang Berprestasi	Persen		100		100			100		100		95		100			
			2	13	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Capaian LPM Kategori Aktif	Persen	100	100	5,452,817,500	100	1,434,380,000	100	1,383,617,192	100	3,900,000,000	100	3,358,220,775	100	15,529,035,467	100	15,529,035,467	

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK				PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB		
											2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH			
											2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat	Persen	95	5,452,817,500	100	1,434,380,000	100	1,383,617,192	100	3,900,000,000	100	3,358,220,775	100	15,529,035,467	100	15,529,035,467			
			2	13	05	2.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelompok karang taruna yang terbina	Kelompok	0	4,959,245,500	0	1,314,380,000	67	1,085,738,192	67	3,400,000,000		5	3,108,220,775	134	13,867,584,467	134	10,759,363,692		
						Jumlah LPM yang terbina	Kelompok	67	67	74		74		282		282										
						Jumlah kader posyandu yang terbina	Kader	37509	3250	650		700		42109		42109										
						Jumlah penilaian Lomba Kampung Resik dan Aman	RT	0	402	402		402		1206		1206										
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga																			
			2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang terbentuk	Kelompok usaha	0	0	29	70,854,500	0	0	0	0	0	0	29	70,854,500	29	70,854,500		
								Jumlah peserta bintek pengemasan produk UP2K	Orang			150		0		0				150		150				
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen										0	0		0	0			
			2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta bintek investor dan siswa	Orang	0	368,072,000	0	40	46,765,500	40	200,000,000		1	100,000,000	80	714,837,500	80	614,837,500		
						Jumlah peserta bintek pengurus dan anggota posyantek	Orang	525	70	70	665			665												
						Jumlah peserta gelar TTG tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	25	10	15	50			50												
						Jumlah peserta penilaian TTG tingkat Kota	Klmpk	0	0	10	10			10												
						Jumlah peserta penilaian TTG tingkat Provinsi	Klmpk	0	0	3	3			3												
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan												1	100,000,000		1	100,000,000			

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK				PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
							KEGIATAN				2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH		
											SUB KEGIATAN	2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			2	13	05	2.01	09	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kelompok		74		74		74		74			296		222			
								Jumlah kelompok pembinaan PKK	Orang		320		0		412		420			1152		832			
								Jumlah peserta bina wilayah PKK	Orang								400			400		400		725.759.000	
								Jumlah peserta bintek PKK	Orang								100			151		100			
								Jumlah peserta jambore PKK tingkat Kota	Orang		51		0		0		200			350		350			
								Jumlah peserta kegiatan 10 program pokok PKK	Orang		0		0		150		250			650		650			
								Jumlah peserta penilaian Hari Kesatuan GerakP KK	Orang		0		250		150		250			650		650			
								Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen										1	150,000,000			1	150,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2	14							4.670.322.492		3.576.917.541		4.948.693.549		6.112.351.000	252	3.042.416.920		21.899.565.082		22.427.151.502		
	Meningkatnya pembangunan keluarga							Indeks iBangga	Poin	NA	NA		0		53.52		57		58		58		58		
	Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui KB							Angka Total Fertility Rate (TFR)	Poin	2.47	2.34		2.37		1.5		2.32		2.31		2.31		2.31		
	Meningkatnya pemberdayaan keluarga sejahtera							Cakupan keluarga aktif ddalam kelompok kegiatan KB	Persen	63	72		75		76		78		80		80		80		
			2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan data keluarga yang akurat	Persen	75	80	434,458,000	82	173,694,111	83.0	95,195,239	85	800,000,000	87	400,000,000	87	1,873,347,350	87	1,903,347,350
			2	14	02	2.01		Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase data keluarga yang akurat	Persen		121,649,750		37,200,000	83	22,730,239	85	400,000,000	86	243,000,000	87	824,579,989	86	824,579,989	
			2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen GDPK	Dokumen		0		0		-	1	400,000,000			2	620,000,000	1	400,000,000	
								Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen										1	220,000,000			1	220,000,000	
			2	14	02	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan kependudukan ke sekolah/masyarakat	Orang		120	121,649,750	100	37,200,000	99	22,730,239	100	0		420	204,579,989	419	181,579,989	
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Laporan										1	23,000,000			1	23,000,000	

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK				PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB
							KEGIATAN				2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH		
							SUB KEGIATAN				2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			2	14	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian pelaporan informasi (updating data)	Persen	78	312,808,250	80	136,494,111	83,0	72,465,000	83	400,000,000	83	157,000,000	83	1,048,767,361	83	1,078,767,361		
			2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Dokumen	1	191,158,500	1	23,970,000	0	-	0	0	0	0	2	240,128,500	2	215,128,500		
			2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen									1	25,000,000			1	25,000,000		
			2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Faskes	64	121,649,750	64	112,524,111	64	72,465,000	64	400,000,000			262	808,638,861	256	706,638,861		
			2	14	02	2.02	14	Jumlah laporan F/II/KB di Faskes	Faskes	64		64		64		64				262		256			
			2	14	02	2.02	14	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	Laporan									12	102,000,000			12	102,000,000		
			2	14	02	2.02	14	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persen	60	68	70	75.00			80		85		85		85			
			2	14	02	2.02	14	Capaian pemenuhan dan pergerakan PLKB dan Kader KB	Persen	60	67	70	3,116,743,430	73.00	3,811,022,310	75	4,165,121,840	80	2,398,348,420	80	16,973,475,072	80	17,390,111,492		
			2	14	02	2.02	14	Capaian PPM peserta KB	Persen	62	66	67	68.00			69		70	70	70	70	70			
			2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Capaian penyuluhan program bangga kencana	Persen	70	1,061,961,750	70	316,343,200	70	674,408,250	75	1,144,332,000	80	572,166,000	70	3,633,211,200		3,769,211,200	
			2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Orang	540	246,142,000	320	60,000,000	300	80,076,250	400	400,000,000.00			1592	886,218,250	1560	786,218,250		
			2	14	03	2.01	01	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Oraganisasi									32	100,000,000			32	100,000,000		
			2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen									1	100,000,000			1	100,000,000		
			2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kali Tayang	6	448,379,750	6	26,343,200	6	140,156,000	6	140,156,000			39	825,112,950	24	755,034,950		
			2	14	03	2.01	03	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit									15	70,078,000			15	70,078,000		
			2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kali	2	40,000,000	2	30,000,000		0	5	150,000,000			10	295,000,000	9	220,000,000		
			2	14	03	2.01	04	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen									1	75,000,000			1	75,000,000		

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK			PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB			
						KEGIATAN				2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH				
										2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	
										2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja	Rp	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah peserta KIE program bangga kencana	Peserta	200	327,440,000	200	200,000,000			0	0	-			401	591,440,000	400	527,440,000	
			2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan								1	64,000,000			1	64,000,000			
			2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terfasilitasinya operasional balai penyuluhan KB	Kecamatan	0	-	0	-	6	454,176,000	6	454,176,000			13	1,035,440,000	12	908,352,000		
			2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan								1	127,088,000			1	127,088,000			
			2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan									1	36,000,000			1	36,000,000		
			2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB	Persen		971,664,500		653,062,500	73	482,797,500	75	716,800,000	80	358,400,000			3,182,724,500		3,182,724,500	
			2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah kader PPKBD yang dibuatkan laporan bulanan Rek.Kel.F/IDa/15 dalam program KKBPK	Kader	6	496,764,500	67	176,062,500	67	165,997,500	67	400,000,000			207	1,438,824,500	207	1,238,824,500		
			2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah laporan rekap program KKBPK	Dokumen	1		1		4		4				10		10			
			2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi								3	200,000,000			3	200,000,000			
			2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terbina kader Sub PPKBD Tingkat Kota Serang (567 orang Sub PPKBD)	Orang	500	474,900,000	804	477,000,000	567	316,800,000	567	316,800,000			2488	1,743,900,000	2438	1,585,500,000		
			2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah data R/I/PUS/15 Tingkat Kelurahan	Dokumen	1		1		8		8				68		18			
			2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang								100	158,400,000			100	158,400,000			
			2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Capaian PPM peserta KB	Persen	66	1,341,619,242	67	1,555,482,730	68.00	2,161,472,560	69	1,811,645,840	75	1,175,438,420	75	7,765,022,372	75	8,045,658,792		
			2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi dari gudang kota ke fasilitas kesehatan KB	Faskes	96	177,005,421	96	220,705,871	96	154,432,000	90	154,432,000			378	827,025,292	378	706,575,292		
			2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan								1	120,450,000			1	120,450,000			
			2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terfasilitasinya penggerakan dan pelayanan KB MKJP	Akseptor	290		1000		1076		1086				3502		3452			
			2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor PUS menjadi akseptor IUD/implant	Akseptor	400	324,053,621	600	326,981,759	837	925,654,560	1250	875,827,840			3137	2,767,072,780	3087	2,452,517,780		
			2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor PUS menjadi akseptor MOW	Akseptor				5		8				113		13				
			2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang								200	314,555,000			200	314,555,000			
			2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB	Unit/Paket	15	693,512,000	25	939,830,100	121	1,054,089,000	21	754,089,000			194	3,874,020,100	182	3,441,520,100		
			2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit									12	432,500,000			12	432,500,000		

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK			PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN						TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
										KEGIATAN		2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH			
										SUB KEGIATAN		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja
										2018																	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
			2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan								1	280,636,420			1	280,636,420				
			2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah bulan pelayanan KB bergerak melalui myuan Terfasilitasinya alokon di faskes KB	Bulan Faskes	12 64	147,048,200	12 64	67,965,000	12 0	27,297,000	12 118	27,297,000		49 246	296,904,200	48 246	269,607,200				
			2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemberdayaan dan peningkatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Persen		523,630,000		591,855,000	68.00	492,344,000	69	492,344,000	77	292,344,000	74	2,392,517,000	77	2,392,517,000			
			2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah akseptor pelayanan KB pada Momentum TMKK, HKG PKK KB dan kerjasama lintas sektor dan mitra kerja	Akseptor	320	214,290,000	330	210,230,000	350	100,075,000	370	100,075,000		1371	724,745,000	1370	624,670,000				
			2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah kegiatan pertemuan kelompok kerja di kampung KB	Kegiatan	6	214,290,000	6	50,535,000	4	75,085,000	4	75,085,000		21	490,080,000	20	414,995,000				
			2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen									1	75,085,000			1	75,085,000			
			2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kecamatan yang melaksanakan operasional balai penyuluhan KB	Kecamatan	6	95,050,000	6	331,090,000	6	317,184,000	6	317,184,000		31	1,177,692,000	24	1,060,508,000				
			2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Capaian Kelompok Kegiatan KB aktif	Persen	62	72	336,989,000	75	286,480,000	76	1,042,476,000	78	1,147,229,160	80	244,068,500	75	3,052,742,660	80	3,133,692,660		
			2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan yang aktif	Persen		72	336,989,000	75	286,480,000	76	1,042,476,000	78	1,147,229,160	80	244,068,500	75	3,052,742,660	80	3,133,692,660		
			2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kelompok PIK-R yang terbentuk	Kelompok	0	0	4	11,670,000	6	14,662,000	6	41,798,000		16	72,530,000	16	68,130,000				
			2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kelompok PIK-R	Kelompok	0	0	0	0	0	12			12			12					
			2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Kelompok									5	4,400,000			5	4,400,000			

URUSAN	TUJUAN	SASARAN	KODE REK				PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN KINERJA	KINERJA TAHUN DASAR	CAPAIAN KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2023)				UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	
							KEGIATAN				2019		2020		2021		2022		2023		SEBELUM		SETELAH		
							SUB KEGIATAN				2018	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		Kinerja
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Paket		6	137,379,000	0		8	296,500,000	10	296,500,000			29	739,449,750	24	730,379,000		
							Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Unit										5	9,070,750			5	9,070,750		
							Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok		92	28,230,000	92	99,805,000	94	19,224,000	94	19,224,000			373	170,983,000	372	166,483,000		
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan										1	4,500,000			1	4,500,000		
							Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan BKB	Kelompok		92		92		94		94					372		372		
							Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan BKL	Kelompok		44		44		48		50					186		186		
							Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan BKR	Kelompok		46		46		46		44					182		182		
							Jumlah kelompok yang mendapat biaya operasional kegiatan UPPKS	Kelompok		41		41		20		45					147		147		
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang										100	61,910,000			100	61,910,000		
							Jumlah calon pengantin yang mendapat pembinaan kespro dan stunting	Pasangan		0		0		1140		1155					2295		2295		
							Jumlah ibu dan keluarga yang mendapat edukasi pengasuhan 1000 HPK	Orang		0		0		2140		2155					4295		4295		
							Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok										5	159,687,750			5	159,687,750		
							Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan										1	4,500,000			1	4,500,000		

Tabel 6.3
Rumusan dan Definisi Operasional Indikator Renstra PD

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
	Indikator	Satuan	Penjelasan Definisi Operasional	Rumus/Formula
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Capaian penilaian RB (pemenuhan, reform, punggkit)	Poin	Penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat	Penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat
Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Lingkup Pemerintah Daerah	Capaian hasil evaluasi LKjIP Perangkat Daerah	Skala / Nilai	Penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat	Penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat
POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	Poin	Jumlah kepuasan pada indikator pelayanan kesekretariatan terhadap Jumlah indikator pelayanan kesekretariatan	Jumlah kepuasan pada indikator pelayanan kesekretariatan -----x100 Jumlah indikator pelayanan kesekretariatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah terhadap target dokumen tersedia	Jumlah dokumen perencanaan & evaluasi kinerja yang disusun -----x100 Jumlah target dokumen perencanaan dan evaluasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan perangkat daerah	Persen	Jumlah ketersediaan dokumen keuangan perangkat daerah terhadap target dokumen tersedia	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD yang disusun ----- x100 Jumlah target dokumen administrasi keuangan PD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	Jumlah ketersediaan dokumen aset barang milik daerah terhadap target dokumen tersedia	Jumlah dokumen administrasi BMD yang disusun -----x100 Jumlah target dokumen administrasi BMD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	Jumlah ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah terhadap target dokumen tersedia	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah -----x100 Target
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum PD	Persen	Jumlah ketersediaan pelayanan administrasi umum PD terhadap target	Jumlah realisasi pelayanan/penyediaan administrasi umum -----x100 jumlah target penyediaan administrasi umum

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
	Indikator	Satuan	Penjelasan Definisi Operasional	Rumus/Formula
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	Jumlah ketersediaan barang milik daerah terhadap target pengadaan barang	$\frac{\text{Jumlah realisasi pengadaan BMD}}{\text{Jumlah target pengadaan BMD}} \times 100$
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	Jumlah realisasi penyediaan jasa penunjang terhadap jumlah target penyediaan jasa penunjang	$\frac{\text{Jumlah realisasi penyediaan jasa penunjang}}{\text{Jumlah target penyediaan jasa penunjang}} \times 100$
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	Jumlah unit BMD yang dipelihara terhadap Jumlah total unit BMD	$\frac{\text{Jumlah unit BMD yang dipelihara}}{\text{Jumlah total unit BMD}} \times 100$
Terwujudnya pemberdayaan perempuan dan pelayanan perlindungan perempuan	Indeks KLA	Skor/ Kategori	Penilaian dilaksanakan oleh Kementerian	Penilaian dilaksanakan oleh Kementerian
	Indeks APE	Skor/ Kategori	Penilaian dilaksanakan oleh Kementerian	Penilaian dilaksanakan oleh Kementerian
Terwujudnya pelayanan yang optimal dan terintegrasi pada perlindungan terhadap perempuan dan hak anak	Rasio KDRT	Rasio	Jumlah KDRT terhadap Jumlah rumah tangga	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100$
	Persentase perlindungan perempuan dan hak anak	Persen	Jumlah penanganan kekerasan pada anak terhadap jumlah kekerasan pada anak	$\frac{\text{Jumlah penanganan kekerasan pada anak}}{\text{Jumlah kasus kekerasan pada anak}} \times 100$
Peningkatan pemberdayaan perempuan	Indeks IPG	Indeks	IPM Laki-laki/ IPM Perempuan	IPM Laki-laki/ IPM Perempuan
	Indeks IDG	Indeks	1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist)	1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist)
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi perempuan terbina dalam pemberdayaan perempuan	Persen	Jumlah organisasi perempuan terbina terhadap jumlah organisasi perempuan	$\frac{\text{Jumlah organisasi perempuan terbina}}{\text{Jumlah organisasi perempuan}} \times 100$
	Cakupan Data Terpilah Gender dan anak	Persen	Capaian penyusunan nilai dari pengamatan atau pengukuran suat variable yang telah dikelompokan menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan	Capaian penyusunan nilai dari pengamatan atau pengukuran suat variable yang telah dikelompokan menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
	Indikator	Satuan	Penjelasan Definisi Operasional	Rumus/Formulasi
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah	Persen	Jumlah lembaga yang telah melaksanakan pengarusutamaan gender terhadap jumlah OPD	$\frac{\text{Jumlah lembaga yang telah melaksanakan pengarusutamaan gender}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pemberdayaan perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persen	Jumlah peserta perempuan yang mengikuti kegiatan pembinaan/bintek terhadap target perempuan yang mengikuti pembinaan/bintek	$\frac{\text{Jumlah peserta perempuan yang mengikuti kegiatan pembinaan/bintek}}{\text{Target perempuan yang mengikuti pembinaan/bintek}} \times 100$
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persen	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berkembang terhadap jumlah lembaga pemberdayaan perempuan	$\frac{\text{Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berkembang}}{\text{Jumlah lembaga pemberdayaan perempuan}} \times 100$
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak	Persen	Jumlah penanganan kekerasan perempuan terhadap jumlah kekerasan perempuan yang terjadi	$\frac{\text{Jumlah penanganan kekerasan pada perempuan}}{\text{Jumlah kekerasan pada perempuan}} \times 100$
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Persen	Realisasi kegiatan pencegahan kekerasan pada perempuan terhadap jumlah kegiatan pencegahan perempuan	$\frac{\text{Realisasi kegiatan pencegahan kekerasan pada perempuan}}{\text{Jumlah kegiatan pencegahan perempuan}} \times 100$
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	Persen	Jumlah layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi terhadap jumlah kekerasan	$\frac{\text{Jumlah layanan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi}}{\text{Jumlah kekerasan}} \times 100$
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Persen	Jumlah realisasi kegiatan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan terhadap Target kegiatan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	$\frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan}}{\text{Target kegiatan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan}} \times 100$
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Capaian peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dari hak anak	Persen	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga terhadap Target	$\frac{\text{Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga}}{\text{Target}} \times 100$
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Persen	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga terhadap Target	$\frac{\text{Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga}}{\text{Target}} \times 100$

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
	Indikator	Satuan	Penjelasan Definisi Operasional	Rumus/Formula
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak	Persen	Capaian penyusunan nilai dari pengamatan atau pengukuran suatu variable yang telah dikelompokkan menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan	Capaian penyusunan nilai dari pengamatan atau pengukuran suatu variable yang telah dikelompokkan menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Capaian ketersediaan data terpilah sistem informasi gender dan anak	Persen	Jumlah ketersediaan data terpilah gender dan anak terhadap banyaknya data	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan data terpilah gender dan anak}}{\text{Banyaknya data}} \times 100$
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	Persen	Realisasi pemenuhan pelebagaan PHA terhadap target	$\frac{\text{Realisasi pemenuhan pelebagaan PHA}}{\text{Target}} \times 100$
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian hak-hak anak di kota serang	Persen	Realisasi kegiatan pelebagaan PHA yang dilaksanakan terhadap target kegiatan pelebagaan PHA	$\frac{\text{Realisasi kegiatan pelebagaan PHA yang dilaksanakan}}{\text{Target kegiatan pelebagaan PHA}} \times 100$
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pelayanan Perlindungan Hak Anak	Persen	Jumlah penanganan kekerasan terhadap anak yang mendapatkan perlindungan terhadap Jumlah kekerasan terhadap anak	$\frac{\text{Jumlah penanganan kekerasan terhadap anak yang mendapatkan perlindungan}}{\text{Jumlah kekerasan terhadap anak}} \times 100$
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak	Persen	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak terhadap Jumlah kegiatan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100$
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	Persen	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus terhadap Jumlah kekerasan pada anak	$\frac{\text{Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus}}{\text{Jumlah kekerasan pada anak}} \times 100$
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak	Persen	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga layanan bagi anak terhadap jumlah target	$\frac{\text{Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga layanan bagi anak}}{\text{Jumlah target}} \times 100$
Terwujudnya pemberdayaan masyarakat	Persentase Kampung Tematik/ KRLA	Persen	Jumlah RT yang mengikuti lomba Kampung Resik lan Aman terhadap jumlah RT yang ditargetkan sebagai peserta	$\frac{\text{Jumlah RT yang mengikuti lomba Kampung Resik lan Aman}}{\text{Jumlah RT yang ditargetkan sebagai peserta}} \times 100\%$
Peningkatan pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang berprestasi	Persen	Jumlah lembaga masyarakat yang berprestasi terhadap Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	$\frac{\text{Jumlah lembaga masyarakat yang berprestasi}}{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina}} \times 100\%$

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
	Indikator	Satuan	Penjelasan Definisi Operasional	Rumus/Formula
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Capaian LPM Kategori Aktif	Persen	Jumlah LPM aktif terhadap jumlah LPM	$\frac{\text{Jumlah LPM aktif}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100$
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat	Persen	Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif terhadap jumlah lembaga	$\frac{\text{Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif}}{\text{Jumlah lembaga}} \times 100$
Meningkatnya pembangunan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	Indeks iBangga diperoleh dari hasil kajian pendataan kependudukan secara periodik 5 tahun sekali. Indeks iBangga dihitung dan ditetapkan oleh BKKBN	Indeks iBangga diperoleh dari hasil kajian pendataan kependudukan secara periodik 5 tahun sekali. Indeks iBangga dihitung dan ditetapkan oleh BKKBN
Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui KB	Angka Total Fertility Rate (TFR)	Poin	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$
Meningkatnya pemberdayaan keluarga sejahtera	Capaian keluarga aktif dalam kelompok kegiatan KB	Persen	Jumlah keluarga aktif dalam kelompok kegiatan KB terhadap total keluarga	$\frac{\text{Jumlah keluarga aktif dalam kelompok kegiatan KB}}{\text{Total keluarga}} \times 100$
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan data keluarga yang akurat	Persen	Jumlah keluarga yang terdata terhadap jumlah keluarga	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang terdata}}{\text{Jumlah keluarga}} \times 100$
Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase data keluarga yang akurat	Persen	Jumlah pendataan keluarga yang memenuhi indikator keluarga terhadap jumlah pendataan keluarga	$\frac{\text{Jumlah pendataan keluarga yang memenuhi indikator keluarga}}{\text{Jumlah pendataan keluarga}}$
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian pelaporan informasi (updating data)	Persen	Jumlah Laporan pengendalian yang masuk terhadap jumlah laporan yang seharusnya	$\frac{\text{Jumlah Laporan pengendalian yang masuk}}{\text{Jumlah laporan yang seharusnya}} \times 100$

Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			
	Indikator	Satuan	Penjelasan Definisi Operasional	Rumus/Formula
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Promosi KIE-KB	Persen	Realisasi promosi KIE-KB terhadap 6 Kecamatan (Segment)	Realisasi kegiatan penyuluhan/promosi KIE-KB -----X100 Jumlah target kegiatan
	Capaian pemenuhan dan penggerakan PLKB dan Kader KB	Persen	Realisasi pendayagunaan PLKB dan kader KB terhadap target	Realisasi pendayagunaan PLKB dan kader KB -----X100 Target
	Capaian PPM peserta KB	Persen	Realisasi peserta KB (aktif dan baru) terhadap PPM	Realisasi peserta KB aktif dan Baru -----x100 PPM
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Capaian penyuluhan program bangga kencana	Persen	Realisasi kegiatan penyuluhan bangga kencana terhadap jumlah kegiatan bangga kencana	Realisasi kegiatan penyuluhan bangga kencana -----x100 Jumlah kegiatan bangga kencana
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB	Persen	Jumlah pembinaan dan pendayagunaan penyuluh KB dan PLKB terhadap jumlah kegiatan pembinaan dan pendayagunaan	Jumlah pembinaan dan pendayagunaan penyuluh KB dan PLKB -----X100 Jumlah kegiatan pembinaan dan pendayagunaan
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPM peserta KB	Persen	Jumlah PPM peserta KB aktif dan Baru terhadap jumlah PPM peserta KB	Jumlah PPM peserta KB aktif dan Baru -----x100 Jumlah PPM peserta KB
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pemberdayaan dan peningkatan dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB	Persen	Realisasi kegiatan pemberdayaan peran serta organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB terhadap jumlah kegiatan pemberdayaan peran serta organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Realisasi kegiatan pemberdayaan peran serta organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB -----x100 Jumlah kegiatan pemberdayaan peran serta organisasi masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Capaian Kelompok Kegiatan KB aktif	Persen	Jumlah keluarga aktif dalam kelompok kegiatan KB terhadap Jumlah keluarga dalam kelompok kegiatan KB	Jumlah keluarga aktif dalam kelompok kegiatan KB -----x100 Jumlah keluarga dalam kelompok kegiatan KB
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan yang aktif	Persen	Jumlah keluarga aktif dalam kelompok kegiatan KB terhadap Jumlah keluarga dalam kelompok kegiatan KB	Jumlah keluarga aktif dalam kelompok kegiatan KB -----x100 Jumlah keluarga dalam kelompok kegiatan KB

Tabel 6.4

Rumusan Rencana dan Realisasi Indikasi Fokus Kegiatan pada Program Unggulan Tahun 2019-2023

Program Unggulan	Realisasi Fokus Kegiatan				Rencana Indikasi/ 2023	Realisasi Pendanaan (Rp)				Pagu Indikatif (Rp) 2023	Keterangan
	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		
Pembangunan kampung tematik	-	Radshow lomba Kampung Resik lan Aman, Launching, Penilaian, Awarding	Kampung Resik Lan Aman : Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 402 RT dari 67 Kelurahan di Kota Serang dengan (kategori Kelompok Pemuda Penggerak Lingkungan, Kelompok Penggerak Sadar Hukum, Lingkungan Paling Berbunga dan Aman, Lingkungan Terinovatif dan Aman dan yang terakhir Lingkungan Paling Hijau dan Aman)	Kampung Resik Lan Aman : Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 402 RT dari 67 Kelurahan di Kota Serang dengan (kategori Kelompok Pemuda Penggerak Lingkungan, Kelompok Penggerak Sadar Hukum, Lingkungan Paling Berbunga dan Aman, Lingkungan Terinovatif dan Aman dan yang terakhir Lingkungan Paling Hijau dan Aman)	Kampung Resik Lan Aman : Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 402 RT dari 67 Kelurahan di Kota Serang dengan (kategori Kelompok Pemuda Penggerak Lingkungan, Kelompok Penggerak Sadar Hukum, Lingkungan Paling Berbunga dan Aman, Lingkungan Terinovatif dan Aman dan yang terakhir Lingkungan Paling Hijau dan Aman)	0	1,014,766,000	1,014,766,000	883,656,000	616,777,657	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 disebutkan bahwa Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Kinerja penyelenggaraan urusan adalah Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Berikut adalah tabel 7.1 yang menyajikan keselarasan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Serang 2018-2023 dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Sehingga indikator kinerja utama dan indikator kinerja mandiri menjadi tolok ukur renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dengan demikian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang mengukur efektifitas kinerja melalui beberapa indikator, yaitu :

- 1) Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD Kota Serang
- 2) Indikator Kinerja yang diukur berdasarkan output kegiatan
- 3) Indikator Kinerja yang diukur berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 (Lampiran 1)
- 4) Indikator Kinerja yang diukur berdasarkan PMDN No. 17 Tahun 2021

Berikut adalah indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Serang.

1. Indikator Kinerja Kepala dinas
 - a. Ratio KDRT
 - b. Persentase Perlindungan Anak

- c. Indeks IPG & IDG
 - d. Angka Total Fertility Rate (TFR)
 - e. i-Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
 - f. Capaian Keluarga aktif dalam Kelompok Kegiatan KB (BKB,BKR, BKL, PIK-R, UPPKS)
 - g. Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah
2. Indikator Kinerja KA.BID Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Persentase Organisasi perempuan terbina dalam pemberdayaan perempuan
 - b. Capaian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kategori Aktif
 3. Indikator Kinerja KA.BID Perlindungan Perempuan Dan Anak
 - a. Cakupan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
 - b. Persentase pemenuhan hak anak
 - c. Cakupan Pelayanan Perlindungan Hak anak
 4. Indikator Kinerja KA.BID Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan Dan Informasi
 - a. Cakupan data keluarga yang akurat
 - b. Cakupan promosi KIE-KB
 - c. Capaian pemenuhan dan penggerakan PLKB dan Kader KB
 5. Indikator Kinerja Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Capaian PPM peserta KB
 - b. Persentase Kelompok Kegiatan KB (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS) yang aktif
 6. Indikator Kinerja Sekretaris / Ka Bidang Kesekretariatan
 - a. Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan

Gambaran terkait indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kaitannya dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, pencapaian kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan, dan pencapaian indikator kinerja daerah Kota Serang dapat dilihat pada tabel 7.1, tabel 7.2 dan tabel 7.3 berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD/ Renstra	Capaian Setiap Tahun				Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra (2023)		Penanggung Jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	
1	Indeks Evaluasi RB	NA	NA	67.31	67.30	68.50	69.00	69.00	69.00		
I	Capaian Hasil Evaluasi LKjIP Perangkat Daerah (skala 0 - 100)	-	66.79	65.62	64.89	67.00	67.50	67.50	67.50		
2	Indeks KLA	Pratama	Pratama	500	540	601	610	Madya	610		
3	Indeks APE	Pratama	Pratama	750	800	800	900	Madya	900		
II	Rasio KDRT	0.98	0.056	0.0047	0.0044	0.0045	0.0044	0.0044	0.0044		
III	Persentase Perlindungan anak	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00		
IV	Indeks IPG	91.16	91.96	92.28	92.47	92.60	93.00	93.00	93.00		
V	Indeks IDG	62.65	62.10	61.26	61.66	62.91	63.20	63.20	63.20		
4	Persentase kampuk tematik / KRLA	-	-	50.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
VI	Persentase Kelompok Masyarakat yang Berprestasi	0	0	26.86	44.77	100.00	100.00	100.00	100.00		
5	Indeks iBangga	NA	NA	0.00	53.52	57.00	58.00	58.00	58.00		
VII	Angka Total Fertility Rate (TFR)	2.47	2.34	2.37	1.50	2.32	2.31	2.31	2.31		
VIII	Capaian keluarga aktif dalam kelompok kegiatan KB	62.00	72.00	75.00	76.00	78.00	80.00	80.00	80.00		

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan
(Permendagri 86 Tahun 2018)

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD/Renstra	Capaian Setiap Tahun			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra (2023)	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah	23	34,51	13,09	15	17	19	20	19
2.2		Partisipasi perempuan di lembaga swasta	77	32,73	34,50	36	37	40	80	40
2.3		Rasio KDRT	0,98	0,56	0,0047	0,0045	0,0040	0,0035	0,70	0,0035
2.4		Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	3,72	1,56	0,75	0,74	0,73	0,72	1	0,72
2.5		Partisipasi angkatan kerja perempuan	45,94	48,68	45,94	64	65	66	49	66
2.6		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	75	100	100	100	100	100	100	100
2.7		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan Terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	71,43	94	100	100	100	100	100	100
2.8		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	76,47	80	100	100	100	100	100	100
2.9		Cakupan penegakan hukum dari tingkatpenyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	57,14	100	100	100	100	100	100	100
2.1		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	100	100	100
2.11		Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	65	60	100	80	85	85	85	85
2.12		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	90	98	100	100	100	100	100
2.13		Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	52	94,75	98	98,5	99	100	60	100
2.14		Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	21,366	22,380	27,53	28	29	30	21,380	30

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD/ Renstra	Capaian Setiap Tahun			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/ Renstra (2023)	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	74	100	100	100	100	100	74	100
7.2		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	74	100	100	100	100	100	74	100
7.3		Persentase LPM aktif	10	10	100	100	100	100	95	100
7.4		Persentase LPM Berprestasi	0	0	0	2	3	4	4	4
7.5		Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	100	100
7.6		Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100	100	100
7.7.		Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan masyarakat	5,66	5,70	64,18	70	80	90	5,95	90
7.8		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	5,66	5,70	9,30	15	20	25	5,95	25
8.1	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,09	1,49	4,42	4,30	4,20	4,00	1	4,00
8.2		Total Fertility Rate (TFR)	2,47	2,34	2,37	2,35	2,32	2,31	2,32	2,31
8.3		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	7,4	48	48	48	48	48	44,4	48
8.4		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	NA	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	30,00	33,33
8.5		Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	1	3	2	4	4	5	5	5
8.6		Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,47	2,34	2,37	2,30	2,20	2,10	2,32	2,10
8.7		Ratio Akseptor KB	69,5	80,14	73,59	73,75	74	75	75,00	75,00
8.8		Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	69,5	80,14	73,59	73,75	74	75	75,00	75,00
8.9		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	1,59	1	32,5	31	30	29	1	29
8.1		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	5,76	32,28	32,28	31,25	31,00	29,50	29,00	29,50
8.11		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	16,50	11,57	16,53	15,00	14,00	13,00	15,0	13,0

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD/Renstra	Capaian Setiap Tahun			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra (2023)	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.12		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	21,93	72,47	15,8	16	16,5	16,9	65	16,9
8.13		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	2,2	2,62	1,31	1,3	1,2	1,0	1,0	1,0
8.14		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	71,38	85,24	83,89	84	84,20	85	85	85
8.15		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	59,76	83,98	90,38	91	92	93	84	93
8.16		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	60,46	85,75	84,54	85	86	87	82	87
8.17		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100
8.18		Cakupan Remaja dalam Pusat informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	36	38	38	42	44	46	46	46
8.19		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	NA	80	100	100	100	100	200	100
8.2		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	78	88,98	86,55	87	88	89	83	89
8.21		Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa / kelurahan	100	100	100	100	100	100	100	100
8.22		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	70	100	100	100	100	100	100	100
8.23		Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	60	91,43	91,43	91,78	92	92,30	75	92,30
8.24		Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	66	67	67	67	67	67	67	67
8.25		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	80	100	100	100	100	100	85	100
8.26		Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	60	78,85	78,85	79	80	81	85	81
8.27		Rata-rata usia kawin pertama wanita	18	19	21	21	21	21	21	21
8.28		Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	65	95,36	21,64	22,50	23	23,50	80	23,50

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Serang Tahun 2018-2023
 (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021)

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja awal periode RPJMD/ Renstra	Capaian Setiap Tahun			Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/ Renstra (2023)
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	22.2	9.62	23.94	0.83	26	28	28
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	NA	NA	NA	100	100	100	100
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	62.65	62.10	61.26	61.66	62.91	63.20	63.20
		Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Poin	NA	NA	NA	NA	85	88	88
			Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	NA	NA	NA	53.52	57	58	58
			Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	69.5	80.14	73.59	75.83	74	75
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)		Persen	16.5	11.57	16.53	14.45	14	13	13

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam perangkat daerah melakukan aktifitas organisasinya, keberhasilan implementasinya pada dasarnya sangat mengutamakan kesungguhan dan komitmen pemangku kepentingan dalam hal ini di tataran sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang. Dukungan masyarakat yang merupakan mitra strategis, semua pihak yang terlibat dalam pembinaan, pemberdayaan perempuan dan masyarakat serta pengembangan layanan keluarga berencana dapat meningkatkan akselerasi dan sinkronisasi dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah Kota Serang dan khususnya visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

RENSTRA ini merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam Pengembangan kualitas hidup perempuan dan anak serta layanan keluarga berencana dan penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan dan isu strategis sebagai bahan koordinasi baik dengan Pusat, Propinsi Banten maupun instansi terkait sehingga terjalin sinergitas dalam pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Implementasi renstra ini diharap dapat berkesinambungan terhadap program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan dalam waktu sebelumnya, sehingga hasil yang diharapkan dari renstra ini dapat optimal dan menghasilkan Tata kelola pemerintahan Kota Serang yang baik.

DIFINISI OPERASIONAL		
No	Nama Indikator	Formulasi Perhitungan
A	INDEKS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks pembangunan manusia dalam agregat gender
	CAPAIAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	Komposite : Penguatan LPM dan Pemanfaatan TTG
1	Capaian keberhasilan pemberdayaan perempuan	Capaian keberdayaan perempuan dalam kualitas hidup perempuan terhadap target
2	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terbina	Realisasi Pembinaan LPM terhadap total LPM
3	Capaian keberhasilan pemberdayaan Masyarakat	Realisasi masyarakat yang berdaya dalam pemanfaatan TTG terhadap target
5	Persentase Organisasi perempuan terbina dalam pemberdayaan perempuan	Realisasi Organisasi perempuan terbina terhadap total
6	Cakupan TTG yang dimanfaatkan	Realisasi pemberdayaan Masyarakat dengan penerapan TTG terhadap target
7	Capaian LPM Kategori Aktif	Realisasi LPM kategori aktif terhadap total
B	CAPAIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Komposite : 2 indikator
1	Penyusunan Data Terpilah Tahunan	Capaian penyusunan nilai dari pengamatan atau pengukuran suatu variable yang telah dikelompokkan menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan
2	Persentase Perlindungan perempuan dan Hak anak	Agregat kinerja 3 indikator bidang
3	Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak	Capaian penyusunan nilai dari pengamatan atau pengukuran suatu variable yang telah dikelompokkan menurut Gender dan anak
4	Cakupan perlindungan Hak perempuan	Realisasi perlindungan hak perempuan (5 hak perempuan) terhadap target
5	Persentase pemenuhan hak anak	Realisasi pemenuhan hak anak (5 cluster) terhadap target
6	Cakupan Penanganan kekerasan perempuan dan anak	Realisasi Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap yang terjadi
C	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	Komposite : TFR, CPR, Unmet need, ASFR, Persentase kehamilan tidak diharapkan

DIFINISI OPERASIONAL		
1	Tingkat Kelahiran Rata-Rata	taksiran jumlah kelahiran anak pada wanita usia subur sesuai BPS
2	Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Realisasi pasang usia subur berKB terhadap total pasangan usia subur
3	Capaian Keluarga aktif dalam Kelompok Kegiatan KB	Realisasi Pemberdayaan ketahanan Keluarga terhadap total keluarga KB aktif
4	Persentase PUS Istri diatas usia 21 tahun	Realisasi PUS Istri diatas usia 20 tahun terhadap total PUS
5	Cakupan promosi KIE-KB	Realisasi promosi KIE-KB terhadap 6 kecamatan (segmen)
6	Capaian pemenuhan dan penggerakan PLKB dan Kader KB	Realisasi pemenuhan dan pendayagunaan (ASN dan Non ASN) PLKB dan Kader KB terhadap target
7	Cakupan data keluarga yang akurat	Realisasi data keluarga yang terdata terhadap total keluarga
8	Capaian PPM peserta KB	Realisasi peserta KB (aktif dan baru) terhadap PPM
9	Capaian Kelompok Kegiatan KB aktif	Realisasi Kelompok Kegiatan KB (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PPKS) aktif terhadap target